

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra



KATA PENGANTAR



**KEPALA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN
PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berbagai regulasi terkait lainnya. Di dalam Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tersaji informasi mengenai capaian kinerja, analisis atas keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, serta langkah strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penyusunan laporan kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Harapan kami, Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja organisasi serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan demi peningkatan layanan dan kinerja di tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan dapat menjadi rujukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Bogor, 30 Januari 2026

Kepala Pusat Pengembangan
dan Pelindungan Bahasa dan Sastra



Dr. Dora Amalia

NIP 197107292002122001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A Gambaran Umum	1
B Dasar Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	4
D. Isu Strategis	6
E. Peran Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis	8
B. Program Prioritas.....	10
C. Rencana Kinerja dan Anggaran.....	12
D. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Akuntabilitas Kinerja	16
B. Realisasi Program dan Agenda Prioritas	50
C. Realisasi Anggaran	55
D. Kinerja Lain-lain.....	59
BAB IV PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Fokus Perbaikan.....	67
Lampiran	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	1
Gambar 1.2 Perkembangan nomenklatur Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	1
Gambar 1.3 Pegawai Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	6
Gambar 3.1 Peta Bahasa, Sastra, dan Aksara hasil pemetaan 2025	11
Gambar 4.1 Sampul Kamus Idiom bergambar	20
Gambar 4.2 Sampul Kamus Peribahasa bergambar	21
Gambar 4.3 Produk alihwahana 2022--2025	22
Gambar 4.4 Linimasa pembuatan produk alihwahana	23
Gambar 4.5 Kegiatan Bineka	23
Gambar 4.6 Kegiatan kunjungan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra	24
Gambar 4.7 Kegiatan fasilitasi pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra	25
Gambar 4.8 Kuesioner pemanfaatan prosuk pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra	26
Gambar 5.1 Tampilan KBBI Daring	30
Gambar 5.2 Capaian pemutakhiran I dan II KBBI	30
Gambar 5.3 Statistik KBBI Daring pada 23 Januari 2026	31
Gambar 5.4 Sampul Senarai Padanan Istilah Asing	31
Gambar 5.5 Sampul Kamus Bidang Ilmu: Strategi Peperangan Semesta	32
Gambar 5.5 Sampul Kamus Bidang Ilmu: Geologi	32
Gambar 5.7 Sampul Kamus Etimologi: Bahasa Belanda	32
Gambar 5.8 Sampul Kamus Etimologi: Bahasa Inggris	33
Gambar 5.9 tampilan dan hasil pemutakhiranaplikasi Sipebi	33
Gambar 5.10 Tampilan aplikasi PASTI	34
Gambar 5.11 Beranda laman Korpus Indonesia (Koin)	34
Gambar 6.1 Petunjuk Teknis Program Pelindungan Bahasa dan Sastra: Pemetaan Bahasa dan Sastra dalam Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara	38
Gambar 6.2 DKT dan Peningkatan Kepakaran Pemetaan dalam Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara.	43
Gambar 7.1 Perkembangan nilai SAKIP	49
Gambar 8.1 Kegiatan FTBIN 2025	51
Gambar 8.2 Peta Bahasa, Sastra, dan Aksara hasil pemetaan 2025	52
Gambar 8.3 Kegiatan pengolahan data hasil pemetaan	52
Gambar 8.4 Kegiatan SKI 1 dan SKI 2	53
Gambar 8.5 kegiatan Pra-Rapat Koordinasi Teknis (Pra-Rakortek)	55
Gambar 9.1 Perkembangan DIPA Tahun Anggaran 2025	56
Gambar 9.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2025	57
Gambar 10.1 Tampilan Wilayah Titik Pengamatan Pemetaan Bahasa melalui Google Lens	60
Gambar 10.2 Kegiatan Bineka	61
Gambar 10.3 Tampilan aplikasi KBBI Daring IOS	62
Gambar 10.4 Sampul Kamus Idiom Bergambar dan Kamus Peribahasa Bergambar	62
Gambar 10.5 Kegiatan uji keterbacaan	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Permasalahan dan Langkah Antisipasi Secara Umum	ix
Tabel 2.1 Data pegawai Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2020--2024	2
Tabel 3.1 Tujuan Strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	9
Tabel 3.2 Matrix Renstra 2025–2029 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	10
Tabel 3.3 Rencana Kerja dan Anggaran 2025	12
Tabel 3.4 Perbandingan Target Renstra dengan Target PK 2025	13
Tabel 3.5 Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2025 ..	14
Tabel 4.1 Capaian Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2025	16
Tabel 4.2 Target dan Realisasi IKK Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	18
Tabel 5.1 Judul cerita dari setiap provinsi	21
Tabel 5.2 Rekap produk alihwahana	22
Tabel 5.3 Data pengunjung tahun 2025	24
Tabel 5.4 Hambatan,Strategi Pencapaian, dan Langkah Antisipasi	27
Tabel 6.1 Target dan Realisasi IKK Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	28
Tabel 6.2 Hambatan,Strategi Pencapaian, dan Langkah Antisipasi	36
Tabel 7.1 Target dan Realisasi IKK Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	38
Tabel 7.2 Penambahan Bahasa dan Sastra Tahun Anggaran 2025 dalam Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara	39
Tabel 7.3 Capaian Aksara pada Tahun Anggaran 2025: Daftar Inventarisasi Permasalahan Aksara di Indonesia	42
Tabel 7.3 Hambatan,Strategi Pencapaian, dan Langkah Antisipasi	45
Tabel 8.1 Target dan Realisasi IKK Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	47
Tabel 8.2 Hambatan,Strategi Pencapaian, dan Langkah Antisipasi	49
Tabel 8.3 Target dan Realisasi IKK Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	49
Tabel 9.1 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja	55
Tabel 9.2 Realisasi Anggaran per IKK	55
Tabel 10.1 Analisa strategi efisiensi tiap IKK	57

IKHTISAR EKSEKUTIF

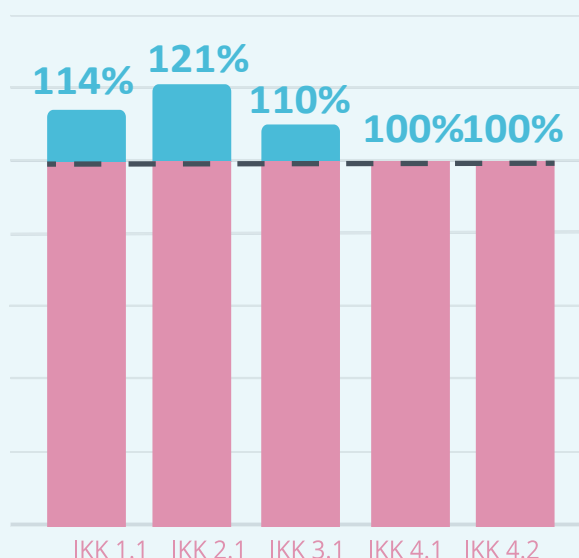
Pada Tahun 2025, satuan kerja telah melaksanakan program dan kegiatan secara terarah untuk mendukung pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian indikator tujuan strategis secara umum menunjukkan hasil yang baik, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan kinerja satker dalam mendukung sasaran strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan berbasis kinerja yang semakin berkualitas, pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Meskipun masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, satker telah melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian strategi untuk memastikan ketercapaian target kinerja. Capaian Tahun 2025 menjadi landasan bagi peningkatan kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun berikutnya

Sepanjang tahun 2025 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra telah mengarahkan seluruh program, kegiatan, dan sumber daya untuk mendukung prioritas nasional, prioritas Kementerian, serta agenda transformasi pendidikan dasar dan menengah.

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif. Dari total 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sebanyak 100% berhasil mencapai atau melampaui target. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menunjukkan area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Berikut ringkasan capaian kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2025:

CAPAIAN KINERJA 2025



109%

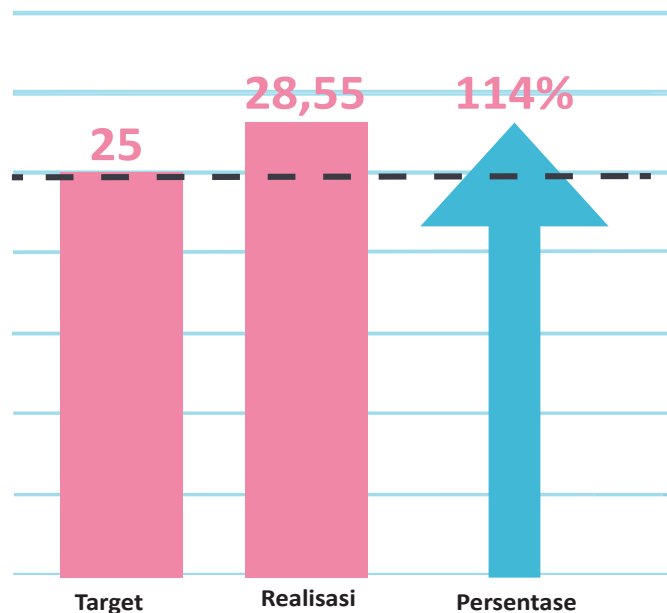
Rata-rata Capaian Kinerja
Rata-rata dari capaian 5 IKK yang
diperjanjikan pada Perjanjian
Kinerja Kepala Pusbanglin 2025
adalah 109%

SASARAN KEGIATAN

1 Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1.1

Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

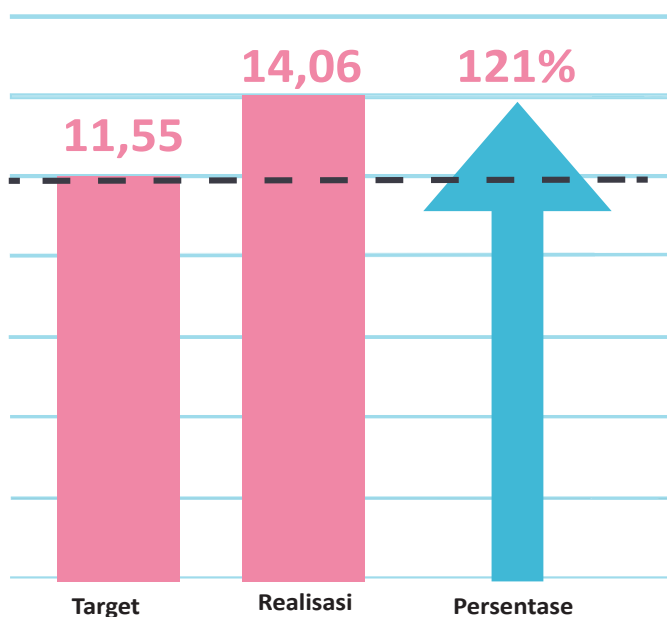


SASARAN KEGIATAN

2 Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.1

Persentase penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

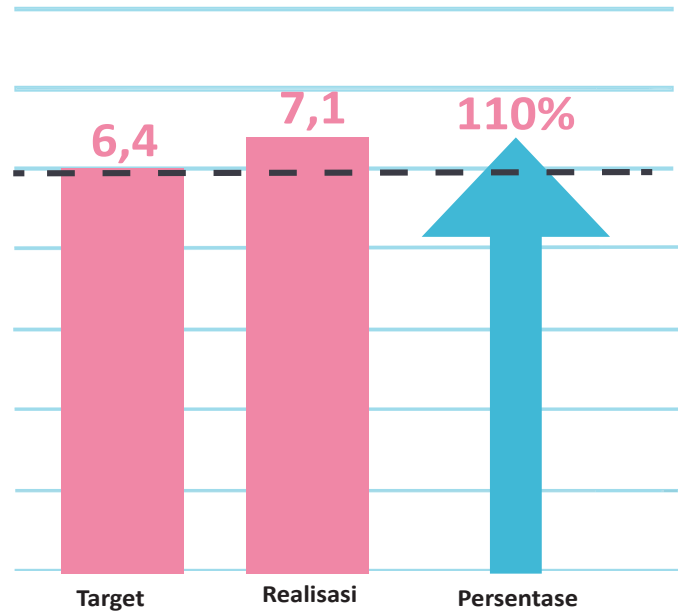


SASARAN KEGIATAN

3 Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3.1

Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

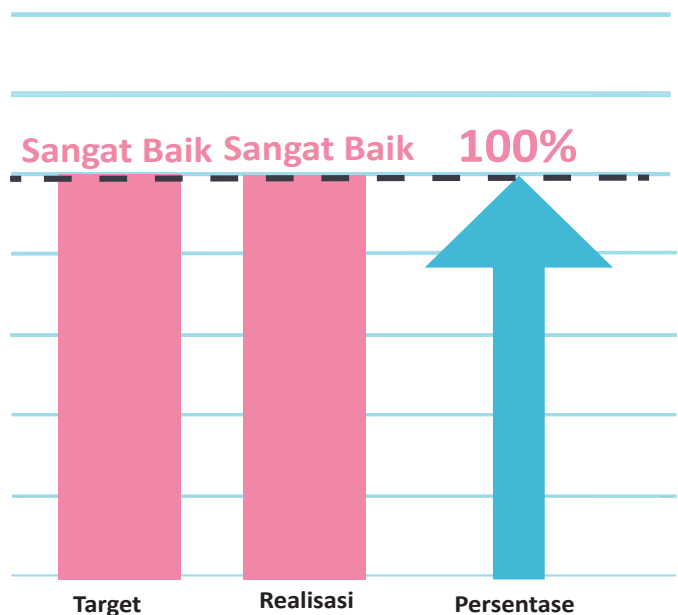


SASARAN KEGIATAN

4 Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4.1

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

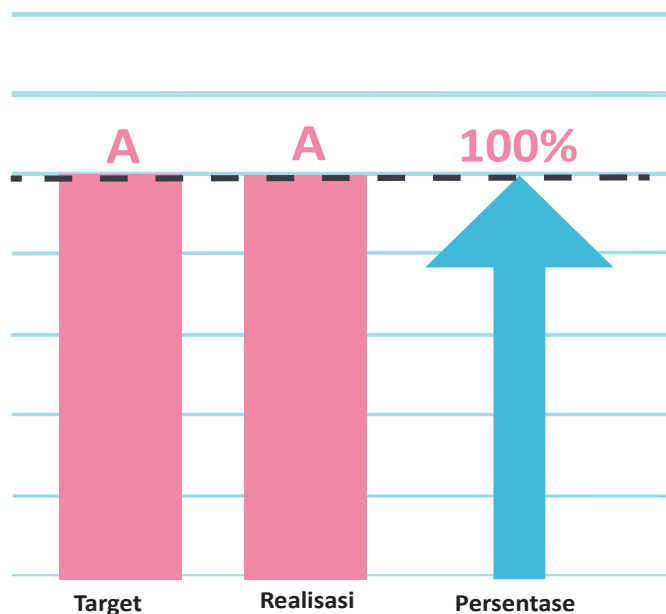


SASARAN KEGIATAN

4 Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4.2

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A



CAPAIAN ANGGARAN 2025



Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Rupiah Murni	Rp32.820.479.000	Rp32.000.397.211	97,50%

Permasalahan dan Langkah Antisipasi Secara Umum

Tabel 1.1 Permasalahan dan Langkah Antisipasi Secara Umum

Permasalahan	Langkah Antisipasi
Terbatasnya jangkauan untuk mendiseminasikan pemanfaatan produk pengembangan bahasa Pusbanglin oleh peserta didik dan terlambatnya ketersediaan bahan yang akan didiseminasikan karena kendala Penilaian Pusbuk dan ISBN.	Memperluas jangkauan diseminasi, setidaknya mencakup 16 UPT Badan Bahasa dan memanfaatkan platform laman Pusbanglin, Instagram, dan YouTube secara maksimal serta memastikan bahan diseminasi selesai tepat waktu atau sesuai dengan lini masa sehingga penilaian Pusbuk dan ISBN dapat segera diperoleh.
Kurangnya koordinasi supervisi terhadap pelaksanaan RBD di daerah sehingga Pusat terlambat mengetahui perubahan yang dilakukan oleh UPT.	Perlu koordinasi dan supervisi yang berkala dan intensif sehingga semua tahapan RBD dapat terkontrol dan capaian RBD dapat sesuai dengan target.
Peretasan aplikasi pemanfaatan produk menyebabkan kinerja tim terhambat dan masyarakat tidak dapat memanfaatkan produk secara optimal.	Meningkatkan keamanan aplikasi melalui pemeliharaan dan perbaikan celah keamanan.
Dokumen dan arsip hasil pemetaan belum tersimpan dengan baik.	Pendigitalan dokumen dan arsip hasil pemetaan bahasa dari tahun 1991–2017, sebanyak 65 ribu lembar dari 1112 buku kuesioner pemetaan di 18 provinsi (data per 19 November 2025).
Ancaman terhadap hak intelektual produk kebahasaan dan kesastraan.	Pendaftaran hak kekayaan intelektual (HAKI) terhadap produk kebahasaan dan kesastraan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum



Gambar 1.1 Kantor Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra merupakan satuan kerja yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa). Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pertama kali dibentuk pada bulan Desember tahun 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 dengan nama Pusat Pengembangan dan Pelindungan. Pada tahun 2019 terjadi kembali perubahan nomenklatur menjadi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan disahkan melalui Permendikbud Nomor 9 tahun 2019.

Perkembangan Nomenklatur Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra



Gambar 1.2 Perkembangan nomenklatur Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Pada tahun 2025 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dipimpin oleh Dr. Dora Amalia sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan jumlah SDM sebanyak 67 pegawai (63 PNS, 3 PPPK dan 1 PPPK Paruh Waktu). Untuk menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melaksanakan rincian tugas melaksanakan analisis pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. Untuk itu dalam mewujudkan kinerja pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dengan hasil maksimal dibutuhkan kelompok jabatan administrasi (JA), jabatan fungsional (JF), dan jabatan pimpinan tinggi (JPT).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki satu Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra, dua tim kerja, yaitu Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan dan Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dan Tata usaha yang setiap kelompok kepakarannya menaungi staf teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pelindungan secara profesional. Keanggotaan kelompok kepakaran ini terdiri atas tenaga fungsional khusus dan nonfungsional (pelaksana) teknis, baik yang berada di Pusat maupun yang tersebar di 30 UPT Balai/Kantor di seluruh Indonesia. Sementara itu, berkaitan erat dengan tugas analisis pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra mulai tahun 2023 tugas tersebut dialihkan pada jabatan fungsional baru, yaitu Widyabasa. Jabatan fungsional Widyabasa memiliki tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Tugas analisis tersebut dilaksanakan sebelumnya oleh jabatan peneliti yang sudah beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional mulai 2022.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 67 aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri atas 63 pegawai negeri sipil, 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 PPPK paruh waktu. Untuk mewujudkan kinerja yang optimal, SDM tersebut dikelompokkan ke dalam jabatan administrasi (JA), jabatan fungsional (JF), dan jabatan pimpinan tinggi (JPT).

Jumlah Pegawai 67 ASN

63 PNS 3 PPPK 1 PPPK Paruh Waktu

Per Jenis Kelamin		Per Pendidikan				
Pria	Wanita	SMA/SMK	DIII	S1	S2	S3
26	41	5	7	37	15	3

Tabel 2.1 Data pegawai Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2020--2024



Gambar 1.3 Pegawai Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2025, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan negara, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun dasar hukum penyusunan laporan ini meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang OTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029.

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas untuk

“Melaksanakan Penyiapan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra”

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melaksanakan fungsi:

1.	Penyiapan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
2.	Pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
3.	Pengelolaan kebinekaan bahasa;
4.	Pembakuan dan kodifikasi bahasa dan sastra;
5.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
6.	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
7.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; dan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam rangka meningkatkan kinerja, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menjadikan nilai budaya kerja Ramah dan Santun sebagai landasan dalam bekerja, Ramah merupakan akronim dari Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis, nilai-nilai ini diharapkan menjadi pedoman kerja bagi ASN untuk melayani masyarakat. Santun merupakan akronim dari Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong, nilai budaya Santun merupakan landasan perilaku yang harus dimiliki seorang ASN. Pengimplementasian budaya Ramah dan Santun diharapkan dapat menciptakan pola kerja yang efektif.

Implementasi Nilai budaya Ramah dan Santun

RAMAH

Responsif Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki media sosial yang aktif sehingga bisa memudahkan masyarakat jika memiliki pertanyaan terhadap pusbanglin

Akuntabel Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melaksanakan evaluasi rutin untuk menjaga akuntabilitas dan hasil evaluasi itu dapat diakses oleh semua orang melalui laman Pusbanglin, untuk menjaga transparansi bagi masyarakat.

- Melayani** Sebagai upaya untuk memenuhi tugas dan fungsinya, Pusbanglin memiliki program pelayanan bagi masyarakat seperti program kunjungan Lab Kebinekaan yang bermanfaat untuk para siswa yang mau belajar terkait bahasa dan sastra.
- Adaptif** Pusbanglin memanfaatkan teknologi berbasis *web* dan media sosial untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat luas.
- Harmonis** Sinergi antara pimpinan dan pegawai yang ada di Pusbanglin adalah upaya nyata sehingga semua target kinerja Pusbanglin berhasil dicapai.

SANTUN

- Setia** Pegawai Pusbanglin menunjukkan kesetiaan melalui dedikasi penuh terhadap visi dan misi Kemendikdasmen dalam pengembangan dan pelestarian bahasa daerah.
- Amanah** Pegawai Pusbanglin selalu bertanggungjawab penuh atas tugas yang telah diberikan dan dikerjakan dengan cermat.
- Negarawan** Pegawai Pusbanglin selalu menjaga wibawa sebagai ASN dalam melayani masyarakat
- Teladan** Pusbanglin menghargai pegawainya yang memiliki etos kerja yang baik, melalui pemberian penghargaan pegawai terbaik, sehingga pegawai tersebut dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya
- Unggul** Pusbanglin memberikan dukungan bagi pegawainya yang ingin meningkatkan kemampuan dan pendidikan sehingga pegawai Pusbanglin dapat meningkatkan kemampuannya untuk bekerja.
- Ngemong** Setiap pegawai Pusbanglin harus memiliki rasa asah, asih, dan asuh terhadap rekan kerjanya sehingga koordinasi dalam pekerjaan dapat berlangsung dengan baik.

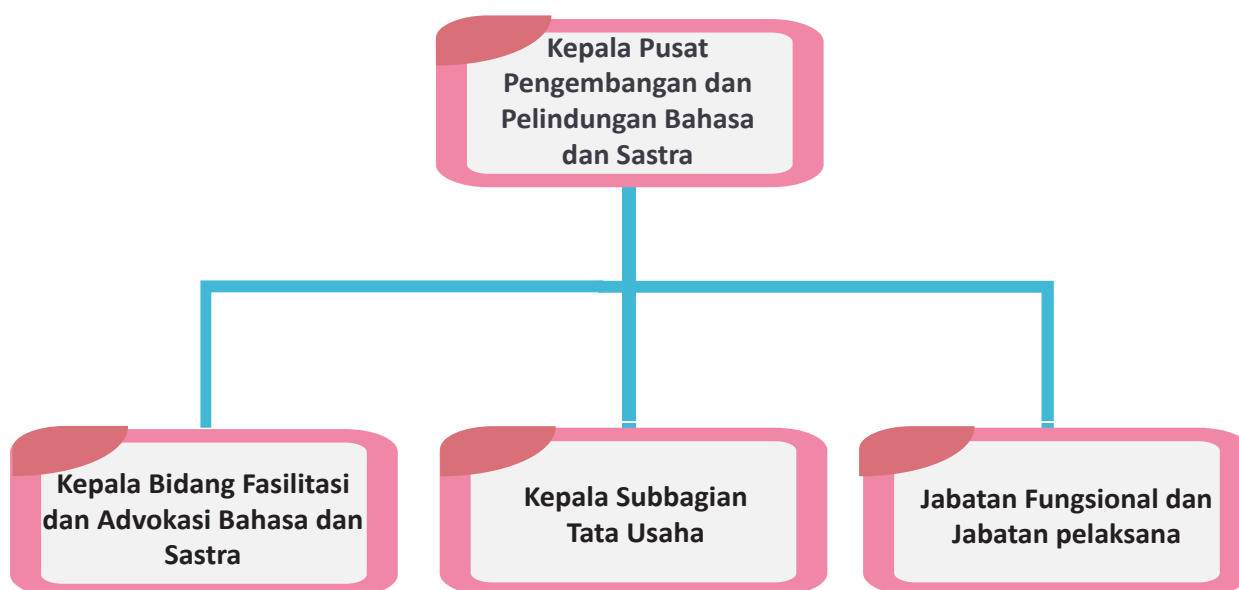
Dampak Perubahan Budaya Kerja

Sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja serta pengimplementasian dari budaya kerja Ramah dan Santun Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, menghasilkan dampak perubahan budaya kerja sebagai berikut

- Peningkatan kedisiplinan pegawai dilihat dari semakin sedikitnya jumlah pegawai yang terlambat
- Tersesalisasinya seluruh target kerja tahun 2025.
- Peningkatan implementasi AKIP ditandai dengan meningkatnya nilai SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Struktur Organisasi

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra terdiri atas satu Kepala Pusat (eselon II), satu Kepala Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra, satu Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bagan struktur organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebagai berikut



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

D. Isu Strategis

1.	Produk pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra belum terdiseminasi secara optimal sehingga masih belum diketahui oleh masyarakat
2.	Kurangnya Keberlanjutan dan Komitmen Pemerintah Daerah. Meskipun terdapat potensi regulasi daerah, implementasi program pelindungan dan revitalisasi sering terhenti atau kurang masif karena inkonsistensi dukungan kebijakan di tingkat lokal
3.	Rendahnya Minat dan Akses Generasi Muda. Metode fasilitasi yang kurang adaptif gagal menarik minat generasi muda
4.	Produk kamus dan pedoman kebahasaan yang ramah pelajar belum banyak sehingga perlu dilaksanakan upaya penyediaan produk tersebut dalam rangka meningkatkan kecakapan literasi membaca peserta didik dan menunjang pendidikan
5.	Kerentanan dan kepunahan bahasa serta sastra daerah akibat melemahnya transmisi antargenerasi, yang menuntut percepatan pemetaan, dokumentasi, dan revitalisasi berbasis komunitas penutur
6.	Identifikasi bahasa dan sebarannya melalui kegiatan pemetaan bahasa sampai dengan 2019 di seluruh Indonesia belum tuntas.
7.	Aksara nusantara belum teridentifikasi dan terdokumentasi melalui pemetaan, baik bahasa maupun sastra
8.	Pengukuran vitalitas bahasa daerah di Indonesia belum dianalisis secara menyeluruh

E. Peran Strategis

1.	Berperan melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan (pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan swasta) agar mereka menerapkan kebijakan perlindungan bahasa daerah.
2.	Berperan dalam memberikan dukungan teknis, bantuan sarana, atau pendampingan bagi komunitas sastra, penulis, dan pegiat bahasa daerah agar ekosistem bahasa dan sastra daerah di masyarakat tetap hidup.
3.	Berperan dalam mengoordinasikan berbagai program literasi untuk meningkatkan kemahiran berbahasa masyarakat, khususnya keterampilan merujuk.
4.	Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) melalui akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
5.	Berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa dan sastra di Nusantara.
6.	Berperan dalam meningkatkan kecakapan literasi membaca peserta didik melalui penyediaan dan pengembangan produk kebahasaan yang menunjang pendidikan
7.	Berperan penting dalam pelaksanaan pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra.
8.	Berperan penting dalam melakukan pembakuan dan kodifikasi bahasa dan sastra.
9.	Berperan penting dalam menyediakan produk-produk kebahasaan dan kesastraan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra), Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra merupakan arah kebijakan dan dasar penyelenggaraan program serta kegiatan selama periode 2025–2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran program/sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja tahunan serta prioritas program yang menjadi pedoman dalam menetapkan target kinerja tahunan, termasuk target pada tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh target kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 merujuk pada indikator dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara konsisten, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Visi

VISI Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui bahasa dan sastra dan mendukung visi Presiden Republik Indonesia yaitu

“mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”

Misi

Untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek dalam mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki misi sebagai berikut.

- Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan.
- Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
- Mewujudkan kelestarian bahasa daerah
- Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Strategis

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan Indikator Kinerja dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penetapannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Tabel 3.1 Tujuan Strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	2025
1.	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca	Persen	64
2.	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	Persen	11,09
		Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	Indeks	54,42
3.	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	Persen	95
		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A

Matriks Kinerja Jangka Mengengah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan sasaran, indikator kinerja dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 3.2 Matrix Renstra 2025–2029
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Kode	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik					
IKK	Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	12,96	26,30	40,37	54,81	70,00
SK	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra					
IKK	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	11,55	23,10	34,66	46,21	57,76
SK	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra					
IKK	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra					
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	A	A	A	A	AA

B. Program Prioritas 2025--2029

Program prioritas Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional. Penetapan program prioritas tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pembangunan sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025, program prioritas diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Selain itu, program prioritas juga difokuskan pada upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra, termasuk bahasa daerah, sebagai bagian dari penguatan jati diri dan karakter bangsa.

Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang direncanakan secara terukur dan terkoordinasi dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, efektivitas pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat. Program prioritas ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas literasi kebahasaan dan kesastraan, memperkuat sikap positif terhadap bahasa Indonesia, serta mendukung pelestarian bahasa daerah dan penguatan peran bahasa Indonesia di tingkat nasional dan internasional.

Adapun program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2025 mencakup berikut ini.

1. Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan
Program ini menyediakan buku berkualitas dan mendukung komunitas literasi akar rumput untuk meningkatkan minat baca dan apresiasi sastra.
2. Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
Program ini mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik dan menegakkan pedoman pengawasan penggunaannya.
3. Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah
Program ini memetakan bahasa, sastra, dan aksara daerah, serta mendorong penutur aktif menggunakan bahasa ibu melalui program revitalisasi.
4. Internasionalisasi Bahasa Indonesia
Program ini bertujuan untuk memperluas penggunaan dan pemahaman bahasa Indonesia di kancah global.

Pada tahun 2025 sebagai pendukung program prioritas terkait Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melaksanakan pemetaan bahasa, sastra, dan aksara. Hingga saat ini, pemetaan bahasa telah menginventarisasi 718 bahasa daerah yang terpetakan. Namun, jumlah tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Penambahan jumlah bahasa dimungkinkan terjadi karena belum seluruh wilayah Indonesia berhasil diverifikasi, sehingga potensi bahasa yang belum terpetakan masih cukup tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan wilayah sekitarnya. Sebaliknya, pengurangan jumlah bahasa dapat terjadi akibat menurunnya jumlah penutur, pergeseran penggunaan bahasa daerah, hingga kepunahan bahasa.

Melalui pemetaan bahasa yang berkelanjutan dan berbasis titik pengamatan yang memadai, diharapkan tersedia data kebahasaan yang akurat sebagai landasan pengambilan kebijakan pelindungan bahasa daerah, termasuk penentuan status vitalitas bahasa, perencanaan program revitalisasi, serta penguatan identitas dan kekayaan budaya bangsa.



Gambar 3.1 Peta Bahasa, Sastra, dan Aksara hasil pemetaan 2025

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Berikut ini adalah rencana kerja dan anggaran tahun 2025

Tabel 3.3 Rencana Kerja dan Anggaran 2025

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen	Satuan	Volume	Anggaran
Kode	Pagu Satker			42.753.480
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			17.622.919
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi			17.622.919
7569.QMA	Data dan Informasi Publik	"dokumen, Peta, Data"	43	17.622.919
7569.QMA.001	Alih Wahana Karya Sastra	dokumen	43	4.790.304
7569.QMA.002	Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	dokumen	9	12.832.615
DU	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan			12.934.346
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah			12.934.346
7566.PEG	Konferensi dan Event	kegiatan	1	5.815.831
7566.PEG.001	"Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah"	kegiatan	1	5.815.831
7566.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat	30	3.200.000
7566.QDD.001	Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah yang Difasilitasi dan Diapresiasi (Komunitas dan Perseorangan)	Kelompok Masyarakat	30	3.200.000
7566.QMA	Data dan Informasi Publik	dokumen, Peta, Data	3	3.918.515
7566.QMA.002	Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	dokumen, Peta, Data	3	3.918.515
WA	Program Dukungan Manajemen			12.196.215
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa			12.196.215
7613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendas, Unit	4	11.150.715
7613.EBA.956	Layanan BMN	dokumen	1	10.000
7613.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	dokumen	1	130.036
7613.EBA.962	Layanan Umum	layanan	1	386.242
7613.EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	1	10.624.437
7613.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Orang, Layanan, Rekomendasi	1	408.677
7613.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	layanan	1	408.677
7613.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4	636.823
7613.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	dokumen	1	27.316
7613.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	dokumen	1	179.088
7613.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	dokumen	1	303.299
7613.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	dokumen	1	127.120

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran, indikator, dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 3.4 Perbandingan Target Renstra dengan Target PK 2025

Kode	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Renstra	Target PK	Keterangan
SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik			
IKK	Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	12,96	25	Target PK melebihi Target Renstra
SK	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra			
IKK	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	11,55	11,55	Target PK melebihi Target Renstra
SK	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra			
IKK	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	6,4	6,4	Target PK sesuai dengan Target Renstra
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra			
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Sangat Baik	Sangat Baik	Target PK sesuai dengan Target Renstra
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	A	A	Target PK sesuai dengan Target Renstra

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2025. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2025.

Tabel 3.5 Perjanjian Kinerja
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2025

Kode	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target
SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik		
IKK	Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	25
SK	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra		
IKK	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persentase	11,55
SK	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra		

IKK	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persentase	6,4
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Kategori	Sangat Baik
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	Predikat	A

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	9.519.915.000
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	29.364.379.000

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra disusun sebagai penyesuaian atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, seiring terjadinya perubahan pada alokasi anggaran, penyesuaian indikator, pergantian pejabat serta dinamika pelaksanaan program selama tahun berjalan.

Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bertujuan untuk memastikan bahwa target kinerja tetap realistis, terukur, dan selaras dengan prioritas strategis kementerian serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Melalui penetapan perjanjian kinerja revisi, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menegaskan kembali komitmen untuk mencapai sasaran kinerja yang telah diperbarui dan menjadikan dokumen ini sebagai dasar pengukuran capaian kinerja akhir tahun 2025.

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal.

Berikut ringkasan revisi Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2025.

Pada tahun 2025, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melakukan penyesuaian target/anggaran melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025. hal tersebut disebabkan adanya

1. Revisi penambahan target IKK Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik Usulan perubahan target IKK Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik dari 12,96% menjadi 25% didasarkan pada hasil peninjauan ulang atas upaya

intervensi kegiatan yang telah dilakukan oleh Pusbanglin untuk menunjang pencapaian indikator pada indeks ini. Intervensi kegiatan tersebut menunjukkan bahwa telah ada upaya dari Pusbanglin yang memberikan hasil positif terhadap persentase pemanfaatan produk pengembangan oleh peserta didik yang telah ditargetkan atau diasumsikan sebelumnya. Dengan demikian, penyesuaian target menjadi 25% dilakukan agar dapat dipastikan kondisi riil dan terkini pemanfaatan buku di lapangan serta pengukuran kinerja yang lebih akurat, proporsional, dan selaras dengan capaian aktual dapat dipastikan.

2. Revisi penambahan target IKK Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara membutuhkan data pemetaan bahasa yang memadai agar dapat berfungsi optimal sebagai dasar perumusan kebijakan. Target 2,8% yang merupakan angka nasional, dinilai belum mencukupi untuk menghasilkan gambaran kebinekaan bahasa, sastra, dan aksara yang komprehensif dalam waktu lima tahun mendatang. Oleh karena itu, peningkatan target menjadi 6,4% diperlukan untuk mempercepat ketersediaan data kebahasaan yang representatif.
3. Pengalihan kelebihan belanja pegawai ke Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
4. Buka blokir Automatic Adjustmen
5. Pengalihan belanja modal ke Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dari Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
6. Kebijakan Pemblokiran Anggaran Perjalanan Dinas 50%

Berdasarkan hal tersebut Pagu Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengalami perubahan. Pagu anggaran DIPA awal sebesar Rp98.388.516.000,00 mengalami perubahan menjadi Rp85.828.852.000,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selama tahun berjalan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melaksanakan pengelolaan kinerja melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan yang selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Capaian kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2025 diukur secara sistematis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, diverifikasi melalui revidu internal, dan dibandingkan dengan target tahunan. Secara umum, sebagian besar indikator kinerja telah tercapai, meskipun beberapa target mengalami deviasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi operasional di lapangan.

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra telah melakukan analisis terhadap capaian yang belum optimal dan merumuskan langkah tindak lanjut sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Proses ini disertai penguatan integrasi perencanaan dan anggaran, peningkatan kualitas data kinerja, serta pengawasan intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 menunjukkan komitmen Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Upaya ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya.

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2025, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2025.

Tabel 4.1 Capaian Kinerja
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2025

Kode	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik				
IKK	Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	25	28,55	114
SK	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra				
IKK	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persentase	11.55	14,06	121
SK	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra				

IKK	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persentase	6,4	7,1	110
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra				
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	100
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	Predikat	A	A	100

SASARAN KEGIATAN

1 Meningkatkan Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik

Kondisi kecakapan literasi membaca peserta didik di Indonesia saat ini tengah berada dalam fase yang cukup menantang, atau sering disebut sebagai masa "darurat literasi". Meskipun peringkat Indonesia dalam studi PISA (*Programme for International Student Assessment*) 2022 mengalami kenaikan posisi secara relatif, skor capaian literasi membaca kita sebenarnya mengalami penurunan menjadi 359 poin, jauh di bawah rata-rata negara yang bergabung dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kemampuan teknis membaca dengan kemampuan memahami konteks, mengevaluasi informasi, dan berpikir kritis atas teks yang dibaca.

Tantangan utama di tahun 2025 ini adalah dominasi "budaya gulir" (*scroll culture*) di media sosial yang menggerus stamina membaca mendalam (*deep reading*) pada generasi muda. Peserta didik saat ini terpapar banjir informasi instan yang membuat mereka cenderung menjadi konsumen pasif, di mana mereka mahir menelan potongan video singkat namun kesulitan saat harus mencerna narasi panjang atau teks yang kompleks. Fenomena ini menciptakan paradoks literasi: siswa sangat aktif di ruang digital, namun lemah dalam menyaring hoaks serta gagal menangkap esensi dari pesan yang bersifat akademis maupun saintifik.

Di sisi lain, pemerintah dan berbagai komunitas mulai mengencakan transformasi melalui Pendekatan Pembelajaran Mendalam daripada sekadar hafalan. Program-program strategis seperti distribusi "Buku Bacaan Bermutu" ke sekolah-sekolah di daerah tertinggal dan penguatan perpustakaan digital menjadi upaya nyata untuk membangun kembali ekosistem literasi. Kunci keberhasilan saat ini bukan lagi sekadar memberantas buta aksara, melainkan bagaimana menciptakan kesenangan membaca agar literasi menjadi gaya hidup yang tumbuh dari kesadaran diri, bukan sekadar tuntutan nilai di rapor.

Menghadapi tantangan literasi yang cukup kompleks saat ini, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (Pusbanglin) bertindak sebagai "mesin penggerak" di balik layar. Mereka tidak hanya mengawasi tata bahasa, tetapi juga merancang strategi agar literasi menjadi kemampuan yang hidup dan relevan bagi siswa.

Berikut adalah upaya dan peran strategis Pusbanglin dalam menjawab tantangan tersebut.

1. Penyediaan produk pengembangan bahasa berupa kamus, baik kamus umum, kamus bidang ilmu, maupun kamus khusus peribahasa dan idiom bergambar. Selain itu, terdapat pula produk pengembangan sastra berupa komik yang ceritanya bersumber dari tema lokal di setiap provinsi.
2. Diseminasikan produk pengembangan bahasa dan sastra kepada masyarakat, termasuk kepada

para pelajar sekolah di seluruh wilayah Indonesia.

3. Revitalisasi Bahasa Daerah sebagai fondasi literasi agar transisi literasi dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia berjalan mulus

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1.1

Persentase penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Tabel 4.2 Target dan Realisasi IKK
Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Tahun 2025			Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	1.1	Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	25	28,55	114%	70	40%

Persentase pengembangan produk bahasa dan sastra yang dimanfaatkan oleh peserta didik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi produk hasil pengembangan bahasa dan sastra (seperti kamus, pedoman, cerita bergambar, komik, dan film animasi) yang telah digunakan, dibaca, atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar, literasi, atau kegiatan lainnya oleh murid pada jenjang dasar dan menengah.

Revisi penambahan target IKK Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik Usulan perubahan target IKK Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik dari 12,96% menjadi 25% didasarkan pada hasil peninjauan ulang atas upaya intervensi kegiatan yang telah dilakukan oleh Pusbanglin untuk menunjang pencapaian indikator pada indeks ini. Intervensi kegiatan tersebut menunjukkan bahwa telah ada upaya dari Pusbanglin yang memberikan hasil positif terhadap persentase pemanfaatan produk pengembangan oleh peserta didik yang telah ditargetkan atau diasumsikan sebelumnya. Dengan demikian, penyesuaian target menjadi 25% dilakukan agar dapat dipastikan kondisi riil dan terkini pemanfaatan buku di lapangan serta pengukuran kinerja yang lebih akurat, proporsional, dan selaras dengan capaian aktual dapat dipastikan.

Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan Peserta Didik (PPDP) diperoleh dari jumlah produk bahasa dan sastra yang dimanfaatkan oleh murid dibagi total produk pengembangan bahasa dan sastra dikali 100. Agar indeks ini dapat dihitung, diperlukan: instrumen survei untuk murid, jumlah sampel per jenjang pendidikan, dan identifikasi responden yang pernah menggunakan/memanfaatkan produk. Penentuan jumlah sampel murid per jenjang dasar dan menengah untuk survei pemanfaatan produk bahasa dan sastra dapat dilakukan secara statistik dengan memperhatikan prinsip representatif, efisien, dan terukur.

$$\text{PPPM} (\%) = \frac{P_p}{P_s} \times 100\%$$

Keterangan:

PPPM : Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

P_p : jumlah produk bahasa dan sastra yang dimanfaatkan oleh murid (produk yang dibaca/digunakan minimal 2)

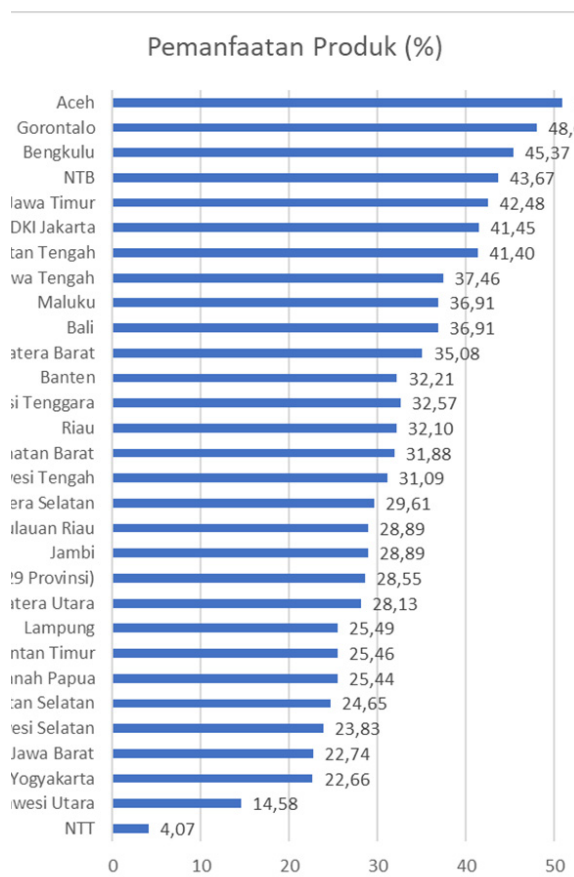
P_s : total produk pengembangan bahasa dan sastra

Nilai PPPM menunjukkan persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh murid.

Rentang interpretasi adalah sebagai berikut

0—25%	Sangat Rendah (Produk hampir tidak dimanfaatkan. Daya jangkauan atau daya tarik sangat minim.)
26—50%	Rendah (Produk mulai dikenal, tetapi masih belum banyak digunakan secara aktif.)
51—75%	Cukup Tinggi (Produk cukup dimanfaatkan dan berpotensi lebih luas digunakan.)
76—100%	Sangat Tinggi (Produk telah berhasil menjangkau dan dimanfaatkan luas oleh peserta didik.)

Berdasarkan perhitungan tersebut melalui metode survei terhadap murid SD dan SMP, diketahui bahwa persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik adalah 28,55. Artinya, produk pengembangan yang dihasilkan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sudah mulai dikenal, tetapi belum banyak digunakan secara aktif. Produk yang daya jangkauannya di bawah berada di 6 provinsi, yaitu NTT, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, terdapat 4 wilayah yang nilainya di bawah nilai rata-rata nasional meskipun persentasenya melebihi dari 25%, di antaranya Tanah Papua, Kalimantan Timur, Lampung, dan Sumatera Utara. Oleh karena itu, di wilayah tersebut diharapkan dapat dilakukan intervensi pada tahun 2026. Adapun wilayah yang persentasenya sudah melampaui target tetap perlu pendampingan berkesinambungan mengingat bahwa produk yang diukur berubah jenis atau bervariasi setiap tahunnya. Dengan kata lain, pelajar akan dihadapkan dengan produk baru yang dihasilkan oleh Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan serta Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.



Grafik 1.1 Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik Berdasarkan Provinsi

Untuk mendukung target IKK Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik, Pusat Pengembangan Bahasa dan Sastra melaksanakan 3 upaya yang mencakup pengembangan produk baru, sosialisasi, serta penghitungan pemanfaatannya, yang semuanya bertujuan meningkatkan literasi dan apresiasi budaya secara luas.

Pertama, kami menambah produk pengembangan khusus untuk peserta didik. Ini meliputi penyusunan kamus penunjang pendidikan, seperti kamus idiom dan kamus peribahasa, yang dirancang mudah dipahami siswa. Selain itu, kami menghasilkan 34 produk kesastraan dalam bentuk alih wahana komik, yang membuat cerita sastra lebih menarik dan relevan bagi generasi muda.

Kedua, sosialisasi dilakukan melalui program Kamus Masuk Sekolah di 5 sekolah wilayah Jakarta. Kegiatan ini memperkenalkan kamus-kamus tersebut secara langsung, sehingga peserta didik dapat meningkatkan literasi sehari-hari dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, kami memfasilitasi pemanfaatan komik kesastraan di 11 provinsi, yaitu Jakarta, Jambi, Banten, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, Jawa Timur, Bengkulu, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Program ini membawa manfaat pendidikan yang merata, memperkuat pemahaman budaya lokal melalui media visual yang akrab bagi siswa.

Ketiga, penghitungan pemanfaatan produk secara menyeluruh melalui program khusus di 11 provinsi yang sama, yaitu Jakarta, Jambi, Banten, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, Jawa Timur, Bengkulu, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara dan melalui kuesioner ke 23 provinsi lainnya melalui Balai/Kantor Bahasa. Data ini menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan minat belajar bahasa dan sastra di kalangan peserta didik, sekaligus mendukung pelestarian warisan budaya Indonesia.

Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Kamus Penunjang Pendidikan: Kamus Idiom Bergambar

Kamus Penunjang Pendidikan: Kamus Idiom Bergambar disusun untuk membantu peserta didik sekolah dasar terutama kelas 4—6 SD memahami makna idiom dalam bahasa Indonesia melalui penjelasan sederhana dan ilustrasi menarik. Kamus ini berisi berbagai idiom yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, disertai arti, contoh kalimat, dan gambar pendukung yang memudahkan pemahaman. Kamus Idiom Bergambar yang disusun pada tahun 2025 memuat 35 idiom yang hidup dan digunakan masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan pemahaman pengguna, kamus disusun dengan ilustrasi yang dilengkapi dengan penjelasan makna dan contoh penggunaannya dalam kalimat. Setiap entri disajikan secara komunikatif dengan makna yang mudah dipahami.



Gambar 4.1 Sampul Kamus Idiom bergambar

Kamus Penunjang Pendidikan: Kamus Peribahasa Bergambar

Kamus Penunjang Pendidikan: Kamus Peribahasa Bergambar disusun untuk membantu pelajar memahami makna dan nilai-nilai dalam peribahasa Indonesia secara mudah, menarik, dan menyenangkan. Setiap peribahasa dikemas dalam bentuk komik edukatif yang menggambarkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamus Peribahasa Bergambar memuat 25 peribahasa yang hidup dan digunakan dalam masyarakat Indonesia. Kamus Peribahasa Bergambar memperkaya sumber belajar bahasa Indonesia untuk menunjang literasi bahasa serta mendukung pembentukan karakter murid sekolah dasar terutama kelas 4–6 SD.



Gambar 4.2 Sampul Kamus Peribahasa bergambar

Produk Pemodernan Sastra: Komik Cerita Daerah

Pada tahun 2025, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melaksanakan kegiatan Alih Wahana Karya Sastra terhadap cerita rakyat dari 34 provinsi di Indonesia sebagai upaya pemodernan sastra agar lebih relevan dan mudah diakses oleh generasi muda. Kegiatan ini menghasilkan 34 produk komik cerita rakyat daerah yang disusun sesuai dengan spesifikasi jenjang pembaca C (10–12 tahun/semjana) dan pembaca D (13–15 tahun/madya). Penjenjangan ini disusundengan mempertimbangkan kemampuan pembaca dalam memahami kompleksitas tingkat dasar, mengikuti alur cerita bertingkat, serta mengenali nilai-nilai lokal yang lebih beragam dan konflik moral yang mulai berkembang. Melalui pendekatan visual dan naratif yang menarik, komik dipilih sebagai medium strategis untuk menjembatani kekayaan cerita rakyat dengan minat baca peserta didik.

Sumber cerita dalam kegiatan ini berasal dari 30 UPT di berbagai daerah dengan tema kepahlawanan lokal (*local heroism*) yang merepresentasikan tokoh, peristiwa, dan nilai kearifan setempat. Pemilihan tema tersebut dimaksudkan untuk menanamkan keteladanan, memperkuat identitas budaya, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap tokoh-tokoh daerah yang berperan penting dalam sejarah dan tradisi lokal. Selain berfungsi sebagai bahan bacaan sastra, produk alih wahana ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pendukung pembelajaran di satuan pendidikan. Produk tersebut berfungsi juga sebagai media literasi budaya yang berkontribusi pada pelindungan dan pemajuan sastra daerah secara berkelanjutan.

Tabel 5.1 Judul cerita dari setiap provinsi

No.	Provinsi	Judul Cerita
1	Aceh	Guru Leman: Benteng Perlawanan Aceh
2	Sumatra Utara	Laksamana Matamapat: Duel di Pulau Jemur
3	Sumatra Barat	Sabai nan Aluih
4	Jambi	Raden Mattahe: Jejak Sang Ksatria
5	Riau	Panglima Hitam: Penjaga Laut Abadi
6	Kepulauan Riau	Wan Sri Beni: Singgasana Keadilan
7	Bengkulu	Putri Kemang: Rahasia Gadis Rimba

No.	Provinsi	Judul Cerita
18	Kalimantan Tengah	Mambang–Tamangung Muda dari Kahayan
19	Kalimantan Selatan	Ratu Zaleha: Catatan Hidup Penerus Perjuangan
20	Kalimantan Timur	Raja Alam: Sang Penjaga Sambalilung
21	Kalimantan Utara	Datu Mansur vs Antu Gelop
22	Bali	Kebo Iwa: Sang Pelindung Bali
23	Nusa Tenggara Barat	Mustika Cempaka: Sang Putri Raksasa
24	Nusa Tenggara Timur	Mulimo dan Jemo

8	Sumatra Selatan	Putri Rambut Putih
9	Bangka Belitung	Datuk Taming Belah: Sang Penjaga Harmoni
10	Lampung	Sultan Domas: Pusaka Penjaga Desa
11	Banten	Nyi Mas Gampang: Api dari Cikande
12	DKI Jakarta	Nyi Mas Melati: Raungan Singa Betina
13	Jawa Barat	Raden Kian Santang: Satria Tanpa Tanding
14	Jawa Tengah	Ratu Kalinyamat: Melawan Portugis
15	DI Yogyakarta	Sekar Pembayun: Kisah Kasih Sang Penari
16	Jawa Timur	Loka Jaya: Langkah Menggapai Keteladanan
17	Kalimantan Barat	Bujang Malaka: Pertemuan Teladan

25	Sulawesi Selatan	Kisah Datu Museng dan Meipa Deapati: Bara Hati Makassar
26	Sulawesi Barat	Tomeand: Ujian Putra Sikente
27	Sulawesi Tengah	Tadulako Bulili: Lumbung Penyanggah Kehidupan
28	Sulawesi Tenggara	Kapitan Wolindi: Perisai Wakatobi
29	Gorontalo	Polumoduyo: Sayembara Raga
30	Sulawesi Utara	Ghumansa Langi: Menantang Raksasa Ansuang
31	Maluku	Martha Christina Tiahahu: Mutiara Nusa Laut
32	Maluku Utara	Sultan Nuku: Pahlawan Pemberontak
33	Papua	Kurabesi: Harmoni Antar Nusa
34	Papua Barat	Putri Yambin dan Gelang Emas

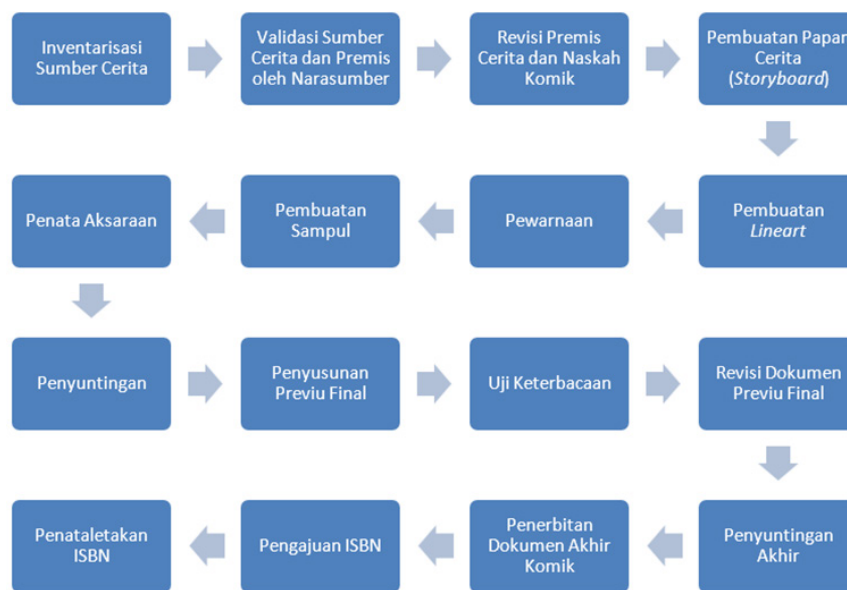
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra telah melaksanakan program alihwahana karya sastra, berikut produk hasil alihwahan yang dikerjakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Tabel 5.2 Rekap produk alihwahana

Tahun	Jumlah	Produk Alihwahana
2022	32	Film Animasi
2023	33	Film Animasi
2024	114	Buku Komik
	61	Buku Cerita Bergambar
2025	34	Buku Komik



Gambar 4.3 Produk Alihwahan 2022--2025



Gambar 4.4 Linimasa pembuatan produk alihwahana

Pengenalan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Diseminasi Pengembangan Bahasa: Bineka (Bingkai Indonesia dalam Aneka Bahasa dan Sastra)

Kegiatan Diseminasi Pengembangan Bahasa: Bineka Keliling (Bingkai Indonesia dalam Aneka Bahasa dan Sastra Keliling) dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiseminasikan produk leksikografi (kamus, ensiklopedi, dan tesaurus) sebagai sarana belajar, meningkatkan pemanfaatan atau penggunaan kamus sebagai sumber rujukan pengetahuan. Kegiatan itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda untuk menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, target pelaksanaan kegiatan pada lima sekolah (dua SD, dua SMP, dan satu SMA) di Jakarta tercapai dengan baik. Adapun dampak signifikan yang dihasilkan adalah siswa menjadi lebih mahir dalam mencari rujukan berupa kamus baik secara daring maupun luring. Selain itu, siswa menjadi lebih bangga dan tertarik dalam menggunakan dan mempelajari bahasa daerah masing-masing.



Gambar 4.5 Kegiatan Bineka

Kunjungan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra

Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Laboratorium Kebinekaan dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi atau pengenalan bahasa-bahasa daerah di Indonesia dan pengetahuan mengenai produk leksikografi seperti kamus, tesaurus, glosarium, dan ensiklopedia. Pemateri atau narasumber berasal dari Tim Kerja di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Di samping itu, materi yang disampaikan disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta kunjungan.

Program kunjungan ke Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra dilaksanakan sebagai upaya untuk mengenalkan keterampilan merujuk (*reference skill*) kepada siswa mulai dari tingkat dasar sampai lanjut. Selain itu, program ini juga dilaksanakan sebagai upaya untuk mengenalkan kepada peserta didik bahasa-bahasa daerah di Indonesia, mempraktikkan bahasa daerah, dan mengetahui bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang berada di ambang kepunahan sebagai motivasi untuk melestarikan bahasa daerah yang dikuasai.

Tabel 5.3 Data pengunjung tahun 2025

No	Tanggal kunjungan	Sekolah/universitas/instansi	Jumlah Pengunjung
1	29 April 2025	SDIT As-Salaam Karanggen dan Gunungputri	125
2	21 Mei 2025	SDN Tarikolot 05	67
3	22 September 2025	SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibinong	40
4	07 Oktober 2025	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Adab dan Humaniora	235
5	08 Oktober 2025	PAUD Desa Puspasari	127
6	19 November 2025	SMK Panca Karya Sentul	81
7	20 November 2025	SMP Panca Karya Sentul	80
TOTAL			755



Gambar 4.6 Kegiatan kunjungan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra

Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa berbagai produk pengembangan yang dihasilkan dapat terdistribusi dan dimanfaatkan secara optimal oleh khalayak luas, khususnya para pengguna langsung dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan literasi. Produk-produk ini memiliki peran vital dalam memperkaya khazanah keilmuan dan praktik pengajaran bahasa serta sastra di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak. Melalui kegiatan ini, diharapkan dinas pendidikan terkait di provinsi serta pihak sekolah untuk terus mendukung dan memperkuat program-program Badan Pengembangan dan Pembinaan

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan komik dan cerita bergambar sebagai media literasi serta meningkatkan minat baca dan kecintaan terhadap sastra. Selain itu, dilakukan pengisian survei pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra.

Secara keseluruhan, target pelaksanaan kegiatan tercapai. Sementara itu, dampak signifikan yang dihasilkan adalah siswa dan guru dapat memanfaatkan produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan yaitu berupa komik sebagai salah satu media pembelajaran di kelas. Selain itu, siswa juga mendapatkan pengalaman belajar membuat komik yang disertai dengan proses kreatifnya bersama narasumber.

Pemanfaatan Produk Pengembangan melalui Komik difokuskan pada 11 provinsi berdasarkan beberapa pertimbangan strategis dan teknis, yaitu

1. provinsi-provinsi tersebut merepresentasikan sebaran wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur yang mencerminkan prinsip pemerataan secara nasional dalam keterbatasan sumber daya;
2. wilayah sasaran memiliki kesiapan kemitraan dengan dinas pendidikan dan satuan pendidikan sehingga produk komik dapat diimplementasikan secara optimal; dan
3. provinsi terpilih menunjukkan kebutuhan dan potensi yang relevan terhadap penguatan literasi kebahasaan pelajar melalui media kreatif, khususnya komik sebagai sarana pembelajaran yang kontekstual dan menarik.

Selain itu, penetapan 11 provinsi ini juga mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan, efisiensi anggaran, serta keterjangkauan agar hasil pemanfaatan produk dapat terukur dan berdampak nyata.



Gambar 4.7 Kegiatan fasilitasi pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra

Survei Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Survei Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra merupakan upaya yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk menghitung Persentase pengembangan produk bahasa dan sastra yang dimanfaatkan oleh peserta didik, yaitu ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi produk hasil pengembangan bahasa dan sastra (seperti kamus, pedoman, cerita bergambar, dan komik) yang telah digunakan, dibaca, atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar, literasi, atau kegiatan lainnya oleh peserta didik pada jenjang dasar dan menengah

Survei dilakukan melalui dua cara. Pertama, survei dilakukan melalui program fasilitasi pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra di 11 provinsi. Instrumen survei diisi oleh para peserta didik yang mengikuti kegiatan tersebut. Kedua, instrumen survei tersebut disebar ke beberapa SD, SMP, dan SMA melalui balai/kantor bahasa yang ada di setiap provinsi. Hasil survei diolah oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang bekerja sama dengan Badan Pusat

SURVEI PEMANFAATAN PRODUK PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

wahyudinuryanto@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

Petunjuk Umum

- Survei ini bertujuan untuk mengetahui apakah kamu pernah menggunakan atau membaca produk bahasa dan sastra (seperti kamus, cerita bergambar, film animasi, komik, dan pedoman berbahasa).
- Jawabanmu akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas dan penyebaran produk bahasa dan sastra di sekolah.
- Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawablah dengan jujur sesuai pengalamanmu.

Nama *

PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

wahyudinuryanto@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

Pemanfaatan Produk

Apakah kamu pernah melihat atau mengetahui produk berikut ini? (centang jika pernah melihat/menggunakan)

- ☐ Kamus Bahasa Daerah
- ☐ Komik Cerita Rakyat
- ☐ Film Pendek Berbahasa Daerah
- ☐ Film Animasi Cerita Rakyat
- ☐ Cerita Bergambar
- ☐ Pedoman Penggunaan Bahasa
- ☐ Other:

Dari produk (komik) yang pernah kamu lihat, mana saja yang kamu baca/dunikan

Gambar 4.8 Kuesioner pemanfaatan produk pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra

Analisa Dampak Manfaat

Manfaat utama dari program-program ini adalah peningkatan kecakapan literasi membaca peserta didik secara holistik, yang membentuk kemampuan memahami teks secara mendalam, menganalisis makna dengan kritis, dan berpikir mandiri serta kreatif di tengah keberagaman bahasa dan budaya Nusantara. Produk inovatif seperti kamus tematik bergambar dan komik adaptasi cerita rakyat daerah tidak hanya menyajikan konten autentik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, tetapi juga memperkaya pengalaman literasi dengan nuansa budaya lokal, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik belajar, ketertarikan pada sastra tradisional yang dimodernisasi, serta pembentukan karakter melalui nilai-nilai kearifan lokal seperti keteladanan pahlawan daerah.

Diseminasi langsung ke sekolah melalui program pengenalan kamus membekali siswa dengan keterampilan merujuk informasi secara mandiri—baik daring maupun luring—sambil membangkitkan rasa bangga terhadap bahasa daerah sebagai bagian identitas etnis, yang pada akhirnya menjembatani pembelajaran formal dengan praktik kehidupan nyata untuk menciptakan generasi yang lebih adaptif dan sadar akan kekayaan linguistik bangsa.

Kunjungan ke laboratorium kebinekaan memperdalam pemahaman tentang dunia perkamusan dan referensi, mulai dari mencari makna kata hingga berkontribusi pada pengembangan kamus nasional, sekaligus memotivasi pelestarian bahasa daerah yang terancam punah melalui praktik langsung, sehingga memperkuat ikatan emosional peserta dengan warisan budaya mereka sendiri.

Fasilitasi pemanfaatan produk di berbagai provinsi memastikan integrasi komik dan cerita bergambar sebagai media pembelajaran kelas yang hidup, yang merangsang imajinasi, kreativitas, dan interaksi positif antara siswa, guru, serta narasumber, membentuk ekosistem literasi berkelanjutan yang menutup kesenjangan pendidikan, melawan manipulasi informasi, dan mewujudkan sumber daya manusia unggul sejalan dengan visi kemajuan nasional.

Menghitung Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik yang benar-benar digunakan dalam belajar dan literasi siswa SD-SMA, dengan survei representatif melalui fasilitasi provinsi dan kuesioner sekolah yang diolah bersama BPS untuk akurasi tinggi.

Analisis Pendukung Ketercapaian Target Indikator Kinerja

Ketercapaian PPPMM didukung tiga upaya utama yang terintegrasi secara strategis: pemerayaan produk melalui alih wahana karya sastra menjadi komik serta pembuatan kamus penunjang pendidikan; pengenalan produk via Kamus Masuk Sekolah (KMS) dan Bineka Keliling di sekolah Jakarta, kunjungan Laboratorium Kebinekaan, serta media sosial; dan fasilitasi pemanfaatan di berbagai provinsi dengan survei kuesioner. Survei PPDP menggunakan instrumen representatif per jenjang SD-SMA (mengukur penggunaan minimal dua kali per produk seperti kamus dan komik), diolah bersama BPS untuk akurasi tinggi, sementara distribusi efektif ke guru-siswa diperluas melalui kolaborasi dengan UPT daerah.

Kerja sama strategis dengan dinas pendidikan terkait program KMS dan Bineka Keliling memperkuat diseminasi kamus serta bahasa daerah di sekolah, memastikan akses optimal dan peningkatan keterampilan siswa secara langsung. Demikian pula, kolaborasi dengan balai kantor bahasa di provinsi yang didatangi untuk kegiatan fasilitasi memfasilitasi distribusi kuesioner survei ke sekolah-sekolah lokal, menghasilkan data akurat dan dukungan berkelanjutan dari pemangku kepentingan regional.

Tabel 5.4 Hambatan, Strategi Pencapaian, dan Langkah Antisipasi

Hambatan	Strategi Pencapaian	Langkah Antisipasi
Produk pengembangan ba-hasa yang khusus untuk pelajar belum tersedia se-hingga produk yang disosialisasikan hanya produk pengembangan sastra beru-pa komik dan cerita ber-gambar.	Memanfaatkan produk yang tersedia, yaitu produk pengem-bangan sastra.	Memastikan semua jenis produk pengembangan bahasa dan sastra disusun pa-da tahun 2025 sehinga dapat diukur pemanfaatann-ya di tahun 2026.
Produk yang akan diukur pemanfaatannya sedang dalam proses penilaian Pusbuk dan belum ber-ISBN.	Berkoordinasi dengan Pus-buk dan segera merevisi atau me-lengkapi jika ada kelengkapan/ persyaratan yang masih belum sesuai/terpenuhi.	Menuntaskan penyusunan produk sesuai lini masa, termasuk ISBN, sehingga produk tersebut sudah siap pada tahun berikutnya untuk diukur pemanfaatannya.

Diseminasi pemanfaatan produk pengembangan belum dapat dilakukan di semua provinsi atau UPT Badan Bahasa

Memaksimalkan diseminasi produk di lokus yang telah terjadwal dan memanfaatkan moda lain, seperti laman dan media sosial untuk memperkenalkan produk Pusbanglin.

Menjadwalkan kegiatan diseminasi di semua provinsi dan memanfaatkan secara maksimal media sosial dan laman.

SASARAN KEGIATAN

2 Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Peningkatan kualitas produk pengembangan bahasa dan sastra menjadi bagian penting dalam mendukung pemajuan dan pelestarian bahasa di Indonesia. Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan tecermin dari makin baiknya kualitas penggunaan bahasa Indonesia oleh penutur terbina serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan ketersediaan produk pengembangan bahasa dan sastra yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan oleh masyarakat luas. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, diperlukan penguatan kualitas produk melalui penerapan proses pembakuan dan kodifikasi. Dengan demikian, produk yang dihasilkan tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga meningkat dari sisi mutu dan keberterimaannya.

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melaksanakan peran strategis dalam meningkatkan kualitas pengembangan bahasa dan sastra melalui inventarisasi kosakata, penyusunan kamus dan berbagai acuan kebahasaan, serta integrasi kosakata dengan teknologi informasi dan komunikasi. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penerapan proses pembakuan dan kodifikasi secara konsisten, sistematis, dan berorientasi mutu guna menjaga stabilitas serta relevansi ketersediaan produk.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.1

Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Tabel 6.1 Target dan Realisasi IKK
Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Tahun 2025			Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi	%		
2	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	2.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	11.55	14.06	121%	57,76	24%

Produk pengembangan bahasa dan sastra disebut tervalidasi jika dalam proses penyusunannya sudah melalui tahapan pembakuan dan kodifikasi. Pembakuan adalah proses, cara, dan perbuatan menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. Sementara itu, kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia.

Tahapan dari proses pembakuan berujung pada validasi. Proses lengkapnya adalah seleksi, elaborasi, verifikasi, dan validasi. Seleksi merupakan langkah awal dalam pembakuan untuk menentukan materi dari korpus melalui pencarian, pengumpulan, dan pemilihan. Adapun elaborasi merupakan perluasan cakupan materi hasil seleksi secara terperinci dan cermat, yang dilakukan melalui analisis, klasifikasi, dan kategorisasi terhadap data kebahasaan dan kesastraan. Sementara itu, verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran konsep hasil elaborasi dengan memanfaatkan sumber rujukan, yang dilakukan melalui pemeriksaan konsep, penyelarasan konsep, konsultasi dan diskusi yang melibatkan pakar, akademisi, praktisi, dan/atau masyarakat adat. Validasi merupakan pengesahan konsep hasil pembakuan, yang dilakukan melalui sidang validasi pakar dan pengesahan hasil validasi. Validasi dilakukan oleh Kepala Badan Bahasa. Setelah proses pembakuan dilakukan proses kodifikasi dengan tahapan: pencatatan, penyelarasan, penyuntingan, dan penerbitan.

Penghitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra pada satu tahun dengan produk pengembangan yang sudah ada, kemudian mengalikannya dengan seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$PPP (\%) = \frac{Pb}{Pa} \times 100\%$$

Keterangan:

PPP : Persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi

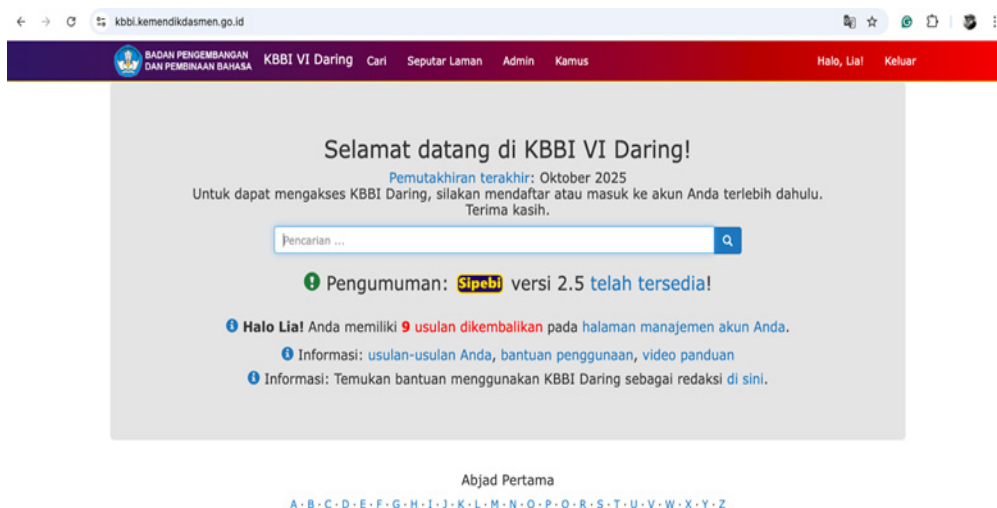
Pb : Jumlah produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi

Pa : Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung realisasi IKK Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi adalah Pemerikayaan Kosakata melalui Sidang Komisi Istilah dan penyusunan korpus. Sidang Komisi Istilah dilaksanakan untuk mengindonesiakan istilah asing dan menyelaraskan istilah yang sudah dipadankan sebelumnya. Sidang Komisi Istilah melibatkan pakar, baik akademis maupun praktisi dari berbagai bidang ilmu untuk mengumpulkan, dan mendiskusikan istilah bidang ilmu tertentu sesuai kepakaran masing-masing. Sementara itu, produk yang dihasilkan untuk mendukung realisasi tersebut adalah Produk Pengembangan Kamus, berupa Kamus Bidang Ilmu Geologi dan Kamus Bidang Ilmu Pertahanan: Strategi Peperangan Semesta, Kamus Etimologi Indonesia–Inggris dan Kamus Etimologi Indonesia–Belanda, dan KBBI.

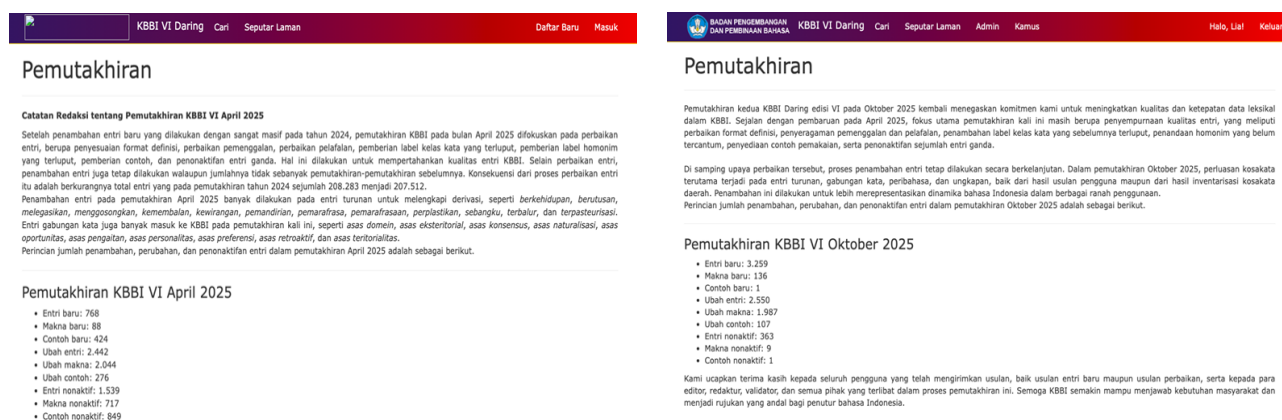
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring

KBBI Daring adalah aplikasi kamus elektronik yang diakses secara daring (*online*) dengan alamat kbbi.kemdikdasmen.go.id. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan bersamaan dengan versi cetaknya pada tanggal 28 Oktober 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang terintegrasi antara fitur penggunaan yang digunakan oleh pengguna dan fitur penyuntingan yang digunakan oleh penyunting atau editor. Ada dua fitur utama yang disediakan untuk pengguna, yaitu fitur pencarian dan fitur pengusulan. Fitur pencarian meliputi pencarian dengan mengetikkan kata atau frasa yang dicari dalam kolom pencarian, pencarian berdasarkan kelas kata, jenis entri, berdasarkan label bidang ilmu, ragam, dan label bahasa, atau berdasarkan abjad. Untuk memperoleh fitur pencarian yang maksimal, pengguna dapat mendaftar sebagai pengguna karena jika tidak, fitur pencarian hanya terbatas pada pencarian dengan kata/frasa tertentu yang diketikkan ke dalam kolom pencarian



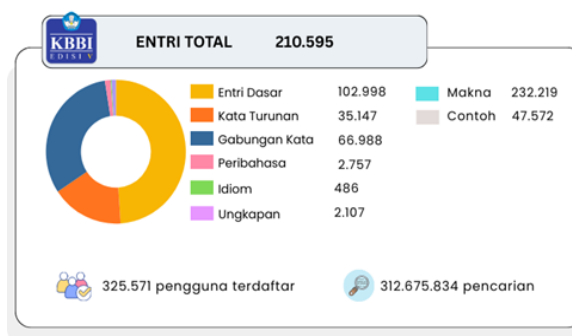
Gambar 5.1 Tampilan KBBI Daring

Pada tahun-tahun sebelumnya penambahan kosakata baru dalam KBBI per tahun secara konsisten kurang lebih 2.000 entri yang dimutakhirkan dua kali dalam setahun. Pemutakhiran KBBI Daring pada April 2025 menghasilkan 768 entri baru dan 8.379 perbaikan entri. Sementara pemutakhiran KBBI Daring pada Oktober 2025 menghasilkan peningkatan 3.259 entri baru dan 5.154 perbaikan entri.



Gambar 5.2 Capaian pemutakhiran I dan II KBBI

Untuk menghasilkan capaian tersebut, Tim Perkamusan dan Peristilahan melaksanakan dua kali konsinyasi pemutakhiran KBBI dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain anggota tim redaksi di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan UPT, redaktur, dan editor eksternal. Sumber entri berasal dari usulan masyarakat, kamus bidang ilmu, serta hasil inventarisasi kosakata bahasa daerah yang terverifikasi melalui Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD) di 30 UPT.



Gambar 5.3 Statistik KBBI Daring pada 23 Januari 2026

2. Senarai Padanan Istilah Asing

Senarai padanan istilah asing adalah kumpulan istilah dari berbagai bidang ilmu serta populer yang telah dibahas dan dipadankan melalui Sidang Komisi Istilah (SKI). SKI dilaksanakan untuk mengindonesiakan istilah asing dan menyelaraskan istilah yang sudah dipadankan sebelumnya. SKI melibatkan pakar, baik akademisi maupun praktisi dari berbagai bidang ilmu untuk mengumpulkan dan mendiskusikan padanan istilah bidang ilmu tertentu sesuai kepakaran masing-masing. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dalam setiap penyelenggaraan SKI tersebut, lima hingga tujuh komisi bidang ilmu bersidang. Bidang ilmu yang disidangkan merupakan bidang ilmu yang masih banyak menggunakan istilah asing, baik dalam kegiatan akademis maupun profesional, karena belum ada padanannya. Selain itu, terdapat pula bidang ilmu yang disidangkan atas permintaan khusus dari lembaga tertentu. Berikut capaian entri dalam senarai padanan istilah asing tahun 2025.



Gambar 5.4 Sampul Senarai Padanan Istilah Asing

Tabel 6.2 Rekapitulasi hasil SKI 2025

No	Bidang Ilmu	Jumlah Entri
1	Ilmu Komunikasi Subbidang Penyiaran	370
2	Ilmu Pendidikan Subbidang Kebijakan Pendidikan	421
3	Ilmu Astronomi Subbidang Astrofisika	345
4	Ilmu Pertahanan Subbidang Strategi Pertahanan Laut	812
5	Ilmu Geologi Subbidang Geologi Struktur	860
6	Ilmu Astronomi Subbidang Sains Keplanetan	431
7	Ilmu Transportasi dan Logistik	507
8	Ilmu Geofisika	565

9	Ilmu Perfilman	821
10	Ilmu Hukum Subbidang Hukum Perdata	278
11	Istilah Populer	
Total Istilah		5.410

3. Kamus Bidang Ilmu: Strategi Peperangan Semesta

Penyusunan Kamus Bidang Ilmu Strategi Peperangan Semesta bertujuan memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam ilmu Pertahanan, khususnya pada subbidang Strategi Peperangan Semesta. Kamus ini disusun sebagai rujukan terminologis yang menghimpun istilah-istilah strategis hasil Sidang Komisi Istilah (SKI) dan mendefinisikannya secara baku berdasarkan konteks keilmuan pertahanan. Proses penyusunan meliputi pendefinisian istilah, penyesuaian konsep, serta penyuntingan kebahasaan agar selaras dengan kaidah bahasa Indonesia. Hasil kegiatan ini berupa Kamus Bidang Ilmu Pertahanan Subbidang Strategi Peperangan Semesta yang memuat 904 entri, disusun secara alfabetis dan dilengkapi penjelasan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi kalangan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di bidang pertahanan



Gambar 5.5 Sampul Kamus Bidang Ilmu: Strategi Peperangan Semesta

4. Kamus Bidang Ilmu: Geologi

Penyusunan Kamus Bidang Ilmu Geologi bertujuan menyediakan rujukan kebahasaan yang mendukung pemahaman konsep-konsep dasar dan terapan dalam ilmu Geologi. Kamus ini memuat istilah geologi yang digunakan dalam kajian kebumih dan mendeskripsikannya secara ringkas, jelas, dan sesuai dengan rujukan ilmiah. Proses penyusunan dilakukan melalui pengumpulan istilah, penelusuran sumber definisi, serta penyuntingan untuk memastikan ketepatan makna dan kebakuan bahasa. Kamus Bidang Ilmu Geologi memuat 287 entri yang disusun secara alfabetis dan dimanfaatkan sebagai sumber rujukan baku oleh akademisi, pendidik, mahasiswa, serta masyarakat yang membutuhkan terminologi geologi dalam Bahasa Indonesia



Gambar 5.6 Sampul Kamus Bidang Ilmu: Geologi

5. Kamus Etimologi: Bahasa Belanda

Kamus Etimologi Bahasa Belanda merupakan kamus yang memuat informasi asal-usul kosakata bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Belanda. Perkembangan tersebut meliputi perubahan bentuk dan maknanya dari masa ke masa. Penyerapan kosakata dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia terjadi melalui berbagai proses, seperti pepadanan, penerjemahan, serta penyesuaian ejaan dan lafal. Dalam KBBI, sebagian kosakata serapan dari bahasa Belanda belum seluruhnya dilengkapi dengan keterangan etimologis. Proses penyusunan kamus melibatkan pakar bahasa Belanda untuk menelusuri sumber asal kata, mencatat perubahan bentuk, serta mendokumentasikan perkembangan makna secara sistematis agar data etimologis tersaji secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 5.7 Sampul Kamus Etimologi: Bahasa Belanda

6. Kamus Etimologi: Bahasa Inggris

Kamus Etimologi Bahasa Inggris memuat informasi etimologis kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris, baik yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, maupun budaya. Kosakata serapan dari bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui proses penerjemahan, pemadanan istilah, serta penyesuaian ejaan dan lafal. Informasi etimologis kosakata tersebut belum seluruhnya tercantum dalam KBBI sehingga diperlukan pendokumentasian yang lebih sistematis melalui penyusunan kamus etimologi. Penyusunan Kamus Etimologi Bahasa Inggris dilakukan dengan melibatkan pakar untuk mengidentifikasi asal-usul kata, menelusuri perubahan bentuk dan makna, serta menyajikan informasi etimologis secara jelas dan terdata dengan baik guna mendukung pengayaan data leksikografis bahasa Indonesia



Gambar 5.8 Sampul Kamus Etimologi: Bahasa Inggris

7. Aplikasi Sipebi

Sipebi merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan perbaikan/penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Aplikasi ini menggunakan pangkalan data KBBI termutakhir dan masukan para ahli bahasa sebagai basis datanya.

Kegiatan pemutakhiran Sipebi pada tahun 2025 berhasil merilis Sipebi versi 2.5 yang diperlengkapi dengan data Kamus Formasi Sipebi (KFS) terbaru sehingga kemampuan sistem dalam mendeteksi dan mengoreksi entri yang mengandung kesalahan morfologis menjadi lebih akurat dan komprehensif. Sipebi versi 2.5 menghadirkan cara kerja aplikasi dan antarmuka yang lebih baik untuk menambah kenyamanan pengguna dalam menggunakan Sipebi.

Unduh Aplikasi

Sipebi
Aplikasi Penyuntingan Ejaan Bahasa Indonesia

Merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan perbaikan/penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Aplikasi ini menggunakan pangkalan data KBBI termutakhir dan masukan para ahli bahasa sebagai basis datanya.

Windows
▲ Penting
Sipebi untuk Windows Operating System (OS) dijalankan menggunakan **.NET Framework 4.6.2** yang datang bersamaan dengan **Windows 10 1607**, yaitu Windows 10 edisi keluaran Juli 2016 ke atas. Jika Anda hendak menjalankan Sipebi pada Windows OS sebelum edisi tersebut (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, dsb.), silakan instal **.NET Framework 4.6.2** pada komputer Anda terlebih dahulu. Penginstal **.NET Framework 4.6.2** dapat diunduh melalui halaman resmi Microsoft berikut:

[.NET Framework 4.6.2 Offline Installer](#)

Aplikasi Sipebi untuk Windows OS dapat diunduh melalui tautan berikut:

[Unduh Sipebi v2.5.1.0 \(Windows\)](#) Diunduh: 187.681 kali

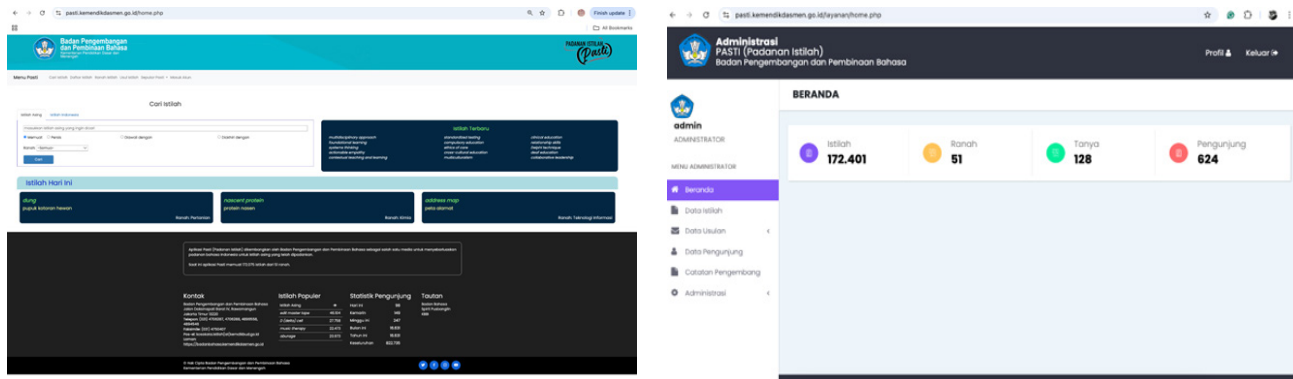


Gambar 5.9 tampilan dan hasil pemutakhiran aplikasi Sipebi

8. Aplikasi PASTI

Pemutakhiran data istilah pada aplikasi PASTI dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan data istilah yang mutakhir, akurat, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan pengguna. Kegiatan ini mencakup peninjauan dan pembaruan data istilah yang telah tersedia, termasuk penyelarasan konsep, perbaikan definisi, serta penyesuaian ejaan dan lafal. Selain itu dilakukan penyelarasan data PASTI agar sesuai dengan hasil SKI.

Sepanjang tahun 2025, kegiatan pemutakhiran menghasilkan pembaruan terhadap 2.208 istilah serta penambahan tiga ranah, yaitu geofisika, geologi, dan transportasi. Saat ini aplikasi PASTI memuat 172.401 istilah dan 51 ranah. Melalui pemutakhiran tersebut, kualitas dan keterandalan basis data istilah pada aplikasi PASTI terus meningkat sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai rujukan peristilahan nasional.



Gambar 5.10 Tampilan aplikasi PASTI

9. Aplikasi Korpus Indonesia (Koin)

Korpus adalah kumpulan data kebahasaan dalam bentuk digital dan dalam jumlah besar yang disimpan dalam suatu aplikasi pengolahan data. Kegiatan penyusunan Koin bertujuan untuk menambah data kebahasaan dalam bentuk digital dan dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan kebahasaan, seperti penyusunan kamus, penyusunan buku ajar, penyusunan soal, penelitian bahasa dan sastra.



Gambar 5.11 Beranda laman Korpus Indonesia (Koin)

Koin terus dikembangkan sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2018. Kegiatan Integrasi Produk Kosakata dengan TIK: Korpus pada tahun 2025 tidak hanya bertujuan untuk memutakhirkan aplikasi Koin baik fitur maupun tampilan antarmuka, tetapi juga memulihkan aplikasi setelah terkena serangan siber berupa peretasan dan migrasi ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Berikut perubahan yang dilakukan pada pemutakhiran Koin tahun 2025.

1. Pemulihan laman pasca serangan siber.
2. Pemutakhiran perangkat lunak dan OS server.
3. Migrasi data ke RDMBS yang lebih baru.

4. Perancangan ulang halaman utama (landing page) dan penyesuaian konten landing.
5. Pengindeksan korpus secara keseluruhan.
6. Perilisan aplikasi (deploy) ke container docker dan versioning.
7. Pencadangan lokal per bulan selama 1 tahun.
8. Migrasi ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
9. Pengayaan data.

Selain pemutakhiran perangkat lunak tersebut, dilakukan juga pemutakhiran pangkalan data korpus. Sejak tahun 2023, pengumpulan data korpus tidak hanya mencakup korpus tulis, tetapi juga korpus lisan. Data korpus tulis yang ditambahkan pada tahun 2025 berasal dari artikel-artikel ilmiah berkategori agama sebanyak 5.000.000 token bersih, tidak terdapat berkas ganda, dan siap diinput ke aplikasi. Sementara itu, penambahan korpus lisan berkategori ragam formal sejumlah 2.000.000 token bersih, tidak terdapat berkas ganda, dan siap diinput ke aplikasi.

Analisa Dampak Manfaat

Produk kamus dan pedoman kebahasaan yang dihasilkan memberikan dampak manfaat yang signifikan bagi peningkatan mutu layanan kebahasaan kepada masyarakat. Keberadaan kamus dan pedoman yang mutakhir memperluas akses pengguna terhadap rujukan bahasa Indonesia yang akurat, sistematis, dan mudah digunakan. Kamus bidang ilmu dan senarai istilah asing, sebagai rujukan kebahasaan yang mendukung pemahaman konsep-konsep dasar dan terapan dalam bidang ilmu tertentu sekaligus bertujuan memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam studi bidang ilmu. Kamus bidang ilmu disusun secara alfabetis dan dimanfaatkan sebagai sumber rujukan baku oleh akademisi, pendidik, mahasiswa, serta masyarakat yang membutuhkan. Pemanfaatan teknologi informasi melalui integrasi produk kamus dengan platform digital dan aplikasi kebahasaan meningkatkan jangkauan layanan serta efisiensi pemanfaatan produk. Pengguna dapat mengakses rujukan kebahasaan secara cepat dan praktis, yang berdampak pada meningkatnya intensitas penggunaan produk kamus dan pedoman kebahasaan di masyarakat. Produk kamus dan pedoman kebahasaan yang dihasilkan tidak hanya menjadi output kegiatan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi kebahasaan dan pemertabatan bahasa Indonesia.

Analisis Pendukung Ketercapaian Target Indikator Kinerja

Tercapainya target Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan didukung oleh berbagai faktor:

1. koordinasi dan kolaborasi yang baik pada tim kerja Perkamusan dan Peristilahan di pusat dan UPT, Pusdatin, dan mitra-mitra lain;
2. pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dalam pengolahan data leksikal;
3. dukungan anggaran yang memungkinkan kegiatan berjalan sesuai rencana sehingga target dapat dicapai secara optimal.

Koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara tim kerja Perkamusan dan Peristilahan di pusat dan UPT, Pusdatin, serta mitra terkait mendukung perencanaan kegiatan yang selaras dengan sasaran strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Penetapan lini masa kegiatan yang terstruktur meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi memberikan arah kerja yang

jelas bagi tim pelaksana. Pelibatan dan pembagian peran yang terstruktur antara tim teknis dan narasumber mendukung efisiensi proses kerja serta menjaga mutu produk yang dihasilkan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data leksikal turut mempercepat tahapan penyusunan produk. Penggunaan sistem pengolahan korpus dan aplikasi kebahasaan turut membantu tahapan penyusunan produk sehingga produk dapat selesai disusun sesuai jadwal. Dukungan manajerial dan penganggaran juga menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan tahapan kerja, mulai dari perencanaan, penyusunan, penelaahan, hingga diseminasi. Koordinasi antarunit kerja dan pemangku kepentingan dilakukan secara intensif sehingga potensi hambatan dapat diantisipasi dan diatasi lebih cepat.

Tabel 6.2 Hambatan, Strategi Pencapaian, dan Langkah Antisipasi

Hambatan	Strategi Pencapaian	Langkah Antisipasi
Beberapa aplikasi pemanfaatan produk mengalami kendala mulai akses melambat, akses terbatas, sampai pada laman yang hilang sama sekali. Beberapa penyebab yang sudah terdeteksi, di antaranya, adalah gangguan serangan siber dan perpindahan domain dari Kemdikbud ke Kemdikdasmen	Mengamankan data aplikasi di server Pusdatin. Menunggu perbaikan dan penyesuaian dengan OS yang terbaru di PDNS dan mengakomodasi pemutakhiran terakhir.	Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait pengelolaan aplikasi-aplikasi
Pengembangan fitur pada aplikasi KBBI daring, KBBI luring, SIPEBI, dan KOIN terkendala masalah clearance.	Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk mendapatkan pendampingan pengajuan clearance.	Penyusunan dokumen dan pengajuan clearance dilakukan maksimal bulan November pada tahun sebelumnya
Pelaksanaan pendampingan penyusunan kamus belum memiliki acuan operasional yang seragam dan terarah.	Penyusunan juknis Pendampingan Penyusunan Kamus sebagai acuan pelaksanaan pendampingan penyusunan kamus yang dilakukan oleh petugas pusat kepada tim UPT dan Penyusunan juknis Penyusunan Kamus Pelajar secara umum.	Menyusun dan menetapkan juknis secara lengkap sebelum pelaksanaan kegiatan, serta melakukan sosialisasi juknis kepada seluruh pihak terkait agar pelaksanaan pendampingan penyusunan kamus berjalan seragam dan terarah.
Validasi produk pengembangan di pusat dan UPT terhambat	Melakukan koordinasi intensif antara pusat dan UPT terkait tahapan dan kelengkapan dokumen validasi produk pengembangan.	Pengajuan templat kata pengantar Kaban dan Menteri oleh Pusbanglin untuk validasi produk pengembangan.

SASARAN KEGIATAN

3 Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra

Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra merupakan sejumlah upaya teknis yang dilakukan dalam pelindungan bahasa dan sastra yang melekat dalam tugas dan fungsi Pusbanglin. Di samping tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, juga melekat kewajiban pembinaan dalam asistensi teknis di bidang pelindungan terhadap UPT Balai/Kantor Bahasa di 30 satuan kerja. Upaya tersebut dilakukan, antara lain melalui Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra yang diukur dalam IKK 3.1.4.1 Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara serta IKK 3.1.4.2 Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas. Pelaksanaan IKK 3.1.4.1 dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pusbanglin bersama UPT Balai/Kantor Bahasa yang melekat dalam implementasi peran, program dan anggaran, sedangkan IKK 3.1.4.2 dilakukan dengan anggaran yang sepenuhnya berada di UPT Balai/Kantor Bahasa. Secara lebih terperinci peran dan fasilitas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Memberikan asistensi teknis pelindungan bahasa dan sastra kepada UPT Balai/Kantor Bahasa di 30 satuan kerja secara terencana dan berkelanjutan
2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman, instrumen, dan standar teknis kegiatan pelindungan bahasa, sastra, dan aksara daerah
3. Melakukan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra di daerah
4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia UPT melalui bimbingan teknis dan koordinasi lintas program.
5. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan validasi data bahasa, sastra, dan aksara untuk mendukung persentase penambahan data entitas yang terpetakan tersebut serta mendukung penambahan penutur bahasa daerah dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah
6. Mengintegrasikan hasil kegiatan UPT ke dalam basis data nasional bahasa, sastra, dan aksara sebagai wujud penguatan pelindungan berkelanjutan.

Sebagai bentuk fasilitas tersebut dihasilkan sejumlah petunjuk teknis untuk menunjang dan menjamin mutu pelaksanaan program pelindungan bahasa dan sastra pada tahun anggaran 2025 berikut.

1. Petunjuk Teknis Perencanaan Pemetaan Bahasa
2. Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Pemetaan Bahasa
3. Petunjuk Teknis Pengolahan Data Pemetaan Bahasa
4. Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pemetaan Bahasa
5. Petunjuk Teknis Pemetaan Sastra Lisan
6. Petunjuk Teknis Pemetaan Sastra Cetak
7. Petunjuk Teknis Pemetaan Manuskrip



Gambar 6.1 Petunjuk Teknis Program Pelindungan Bahasa dan Sastra: Pemetaan Bahasa dan Sastra dalam Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3.1

Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Tabel 7.1 Target dan Realisasi IKK
Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	%
			Target	Realisasi	%		
3	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.1 Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	6,4	7,1	110%	18,8	37%

Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam Peta Kebinekaan” merupakan upaya pendataan dan pemutakhiran informasi kebahasaan, ke-sastraan, dan keaksaraan sebagai basis data kebahasaan nasional. Yang dihitung bukan sekadar jumlah data yang terkumpul, melainkan data yang telah melalui proses verifikasi, meliputi validasi dan peninjauan oleh pakar, pengecekan kelengkapan metadata, serta kesesuaian standar mutu sebelum dipublikasi dalam capaian Peta Kebinekaan. Indikator itu menilai capaian program secara kuantitatif terhadap target yang ditetapkan, serta memastikan bahwa perkembangan peta tidak hanya bertam-

bah secara jumlah, tetapi juga sebaran bahasa dan penuturnya diketahui secara sah. Di samping itu, indikator tersebut berfungsi sebagai alat kontrol mutu dan pendorong percepatan pemetaan keragaman bahasa, sastra, dan aksara secara nasional. Dengan demikian tidak hanya memotret capaian secara output semata, akan tetapi juga berdampak sebagai sumber rujukan kebijakan, dokumen perencanaan, serta pengembangan

$$\text{PPPBB (\%)} = \frac{x}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

PPB : persentase penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara dalam Peta Kebinekaan

x : penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara

n : Jumlah bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan

Berdasarkan Tabel IKK 3.1 Capaian IKK Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara pada tahun anggaran 2025 menunjukkan bahwa realisasi penambahan bahasa, sastra, dan aksara melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalisasi pelaksanaan pemetaan terpadu, dukungan balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia, tim ahli pemetaan bahasa dan sastra, serta sinergi dengan pemerintah daerah.

Output utama yang dihasilkan berupa data pemetaan bahasa, sastra, dan aksara daerah yang mencakup identifikasi bahasa dan dialek, sebaran geografis penutur, inventarisasi sastra lisan, sastra cetak, dan manuskrip, serta pendataan aksara daerah. Pada tahun 2025, capaian output menunjukkan peningkatan cakupan wilayah pemetaan dan kelengkapan data dibandingkan tahun sebelumnya. Data hasil pemetaan telah diintegrasikan ke dalam Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara dan menjadi bagian dari basis data kebahasaan nasional. Capaian setiap entitas secara lebih terperinci ditampilkan dalam tabel berikut

Tabel 7.2 Penambahan Bahasa dan Sastra Tahun Anggaran 2025 dalam Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara

No.	Wilayah Kerja Provinsi	Jumlah Penambahan Bahasa/Sastra	Bahasa/Sastra Terpetakan
1.	Kalimantan Tengah	5 bahasa	1. Belawan, 2. Dayak Siang, 3. Dusun Ma-lang, 4. Pangkut, 5. Ruku Mapam
2.	Kalimantan Barat	2 bahasa	1. Dayak Ope-ope, 2. Dayak Tabah
3.	Kalimantan Selatan	1 bahasa	1. Dayak Meratus
4.	Sulawesi Tengah	2 bahasa	1. Mori, Bual
5.	Maluku	1 bahasa	1. Manombai/Ganabai
6.	Maluku Utara	1 bahasa	1. Gebe

7.	Jawa Timur	3 bahasa	1. Mandar, 2. Bugis, dan 3. Makassar
8.	Jambi	1 bahasa	1. Sunda
9.	DIY	3 sastra cetak	1. Antologi Jagading Lelembut, 2. Antologi Cerita Cekak Necep Banyu Panguripan 3. Manjing Ajur Ajer (Antologi Crita Cekak)
		16 manuskrip	1. Serat Gandakusuma, 2. Serat Centhini, 3. Serat Menak, 4. Tanpa judul, 5. WEDDHA SANYATA, 6. Babad Nagyogyakarta Hamengku Buwana VII, 7. Kakawin Bharatayudha, 8. Prasi Arjunawiwāha, 9. Lontar Putru 10. Tatakramaning Wwang, 11. Serat Kartawiyoga, 12. Serat Sakuntala, 13. Serat Ramawijaya, 14. Pakem Wirama Wilet Gendhing Berdongga Laras Su-lendro III, 15. Pakem Wirama Wilet Gendhing Berdongga Laras Surendro tuwin Laras, 16. Pratanipun Gangsa
10.	Bali	10 sastra lisan	1. Asal Usul Pura Surud Ayu, 2. Braya Atut Sampi Idup (Bedag-beda-gan), 3. Sudamala, 4. Purana Dewa Betara Tirta Empul, 5. Tata Titi Pangilen Upacara Atiwa-Tiwa Desa Adat Manukaya, 6. Geguritan Panca Datu, 7. Kidung Canda Wisika, 8. Kidung Jerum Suci Nerus, 9. Kidung Pangkur Ending, 10. Kidung Sruti Gayatri

		10 manuskrip	1. Ushada Cetik, 2. Panawar, 3. Wisada Rare, 4. Babayan Ratuning Wisesa, 5. Pamatuh Atuh, 6. Pamancut Guna, 7. Pangancing Bumi, 8. Wisnu Kro-dha, 9. Pangraksa Jiwa, 10. Pamatuh Agung II,
11.	Banten	4 sastra lisan	1. Jangjawokan, 2. Macasyekh, 3. Rajah, 4. Kidung Sri
12.	Sulawesi Utara	2 sastra lisan	1. Mapalus, 2. Do'ong Kinatowaiku,

Berdasarkan tabel tersebut penambahan bahasa sebanyak 16 di 8 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Jambi, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara. Sebanyak 11 bahasa baru bertambah di 5 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah (bahasa Belawan, Dayak Siang, Dayak Malang, Pangkut, dan Ruku Mapam), Kalimantan Selatan (bahasa Dayak Meratus), Kalimantan Barat (bahasa Dayak Ope-ope dan Dayak Tabah), Sulawesi Tengah (Bahasa Mori dan Buol). Bahasa tersebut merupakan bahasa baru yang belum masuk dalam Peta Bahasa Nasional saat ini. Selain bahasa baru, terdapat pula penambahan sebanyak 5 sebaran bahasa baru di 3 provinsi yang sebelumnya belum teridentifikasi di Peta Bahasa Nasional. Penambahan tersebut berada di wilayah Maluku (bahasa Manumbai), Maluku Utara (bahasa Gebe), Jawa Timur (bahasa Bugis, Makassar, dan Mandar), Jambi (bahasa Sunda). Adapun wilayah provinsi lain tidak menambah bahasa baru, akan tetapi menambah perluasan sebaran pada bahasa yang sama di provinsi tersebut berupa dialek, subdialek dan/atau wicara.

Sementara itu, penambahan sastra baru sebanyak 45 karya/naskah sastra di 4 provinsi, yaitu Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Utara. Penambahan sastra baru di Banten sebanyak 4 karya, di Sulawesi Utara sebanyak 2 sastra, di Bali menambah 10 sastra lisan dan 10 manuskrip, sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta menambah 3 sastra cetak dan 16 manuskrip. Nama karya/naskah sastra baru tersebut dirincikan dalam tabel diatas. Adapun pelaksanaan pemetaan sastra yang juga dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur tidak menambahkan jumlah sastra pada 2025 karena obyek sastra yang diambil belum lengkap sehingga belum dapat diverifikasi lebih lanjut. Wilayah balai/kantor bahasa lain tidak melaksanakan pemetaan sastra pada 2025, kegiatan akan dimulai di seluruh UPT Balai/Kantor pada tahun anggaran 2026.

Berbeda dari capaian bahasa dan sastra yang berupa penambahan entitas, capaian pemetaan aksara pada tahun anggaran 2025 adalah identifikasi permasalahan aksara di Indonesia. Permasalahan aksara yang berhasil diinventarisasi sebagai capaian output pemetaan aksara tahun anggaran 2025 meliputi sejumlah aspek, antara lain konseptual dan terminologis, data dan dokumentasi, kodifikasi dan standarisasi, transmisi dan pewarisan, pemanfaatan sosial dan budaya, digitalisasi dan teknologi, serta kelembagaan dan kebijakan. Daftar Inventarisasi Permasalahan Aksara di Indonesia disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 7.3 Capaian Aksara pada Tahun Anggaran 2025:
Daftar Inventarisasi Permasalahan Aksara di Indonesia

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Konseptual	1. Belum terdapat pemahaman nasional mengenai pengertian aksara daerah sebagai sistem tulisan yang merepresentasikan pemilik dan pengetahuan pemiliknya. 2. Masih terdapat perbedaan penggunaan istilah aksara, huruf, tulisan, dan sistem ortografi dalam dokumen kebijakan, kajian akademik, dan praktik di lapangan. 3. Terdapat perbedaan penamaan dan pengelompokan aksara yang sama di berbagai wilayah tanpa standar rujukan yang disepakati secara nasional.
2.	Data dan Dokumentasi	1. Belum tersedia basis data nasional aksara daerah yang memuat informasi persebaran, variasi bentuk, fungsi sosial, dan tingkat keberlanjutan aksara. 2. Data/sumber data aksara daerah yang masih tersebar di berbagai lembaga dan pihak belum dikoordinasi oleh lembaga yang berwenang. 3. Data aksara dalam sejumlah naskah, prasasti, dan dokumen beraksara daerah belum terdokumentasi secara memadai. 4. Inventarisasi belum secara jelas membedakan antara aksara yang masih digunakan (living scripts) dan aksara yang sudah jarang atau tidak lagi digunakan (endangered atau dormant scripts).
3.	Digitalisasi dan Teknologi	1. Belum semua aksara daerah telah terdaftar dalam sistem unicode sehingga belum meratanya penggunaan aksara daerah secara luas dalam ruang digital. 2. Ketersediaan font, papan ketik, dan perangkat lunak pendukung aksara daerah masih terbatas dan belum merata. 3. Digitalisasi naskah beraksara daerah belum sepenuhnya diikuti dengan kegiatan alih aksara dan transliterasi yang dapat diakses publik. 4. Pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran dan promosi aksara daerah masih belum optimal.
4.	Kelembagaan	1. Belum tersedia peta jalan nasional yang secara khusus mengatur pemetaan, perlindungan, dan pengembangan aksara daerah. 2. Koordinasi antarlembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas masih bersifat sektoral. 3. Dukungan anggaran untuk kegiatan pemetaan dan perlindungan aksara daerah masih terbatas. 4. Peran komunitas sebagai subjek utama pelestarian aksara daerah belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan.

Upaya Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk mencapai target Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan dilakukan melalui fasilitasi yang dimanfaatkan oleh tim pemetaan di balai kantor bahasa dengan kegiatan sebagai berikut.

1. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan Peningkatan Kepakaran Pemetaan dalam Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara.

Kegiatan DKT Peta Kebinekaan dilaksanakan pada 11 Juni 2025 yang diikuti oleh Kepala Balai/Kantor Bahasa serta staf pemetaan bahasa yang ditugasi hadir daring dan luring. Kegiatan tersebut membahas titik pengamatan di setiap provinsi di Indonesia yang telah diusulkan setiap UPT Balai/Kantor Bahasa. DKT dilaksanakan mulai pukul 8.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Pembahasan titik pengamatan dalam DKT berlangsung dalam 3 sesi bersama 5 orang narasumber ahli pemetaan bahasa. Kelima narasumber tersebut adalah Prof. Multamia Lauder, Prof. Kisyani Laksono, Prof. Nadra, Prof. Ni Made Dhanawaty, serta ahli aplikasi peta, Ferry Feirizal.

Pelaksanaan peningkatan kepakaran pemetaan bahasa dimulai secara daring dari tanggal 2—5 Juli 2025 dan dilanjutkan pada tanggal 10—16 Juli 2025 secara luring. Peserta kegiatan terdiri atas dua perwakilan dari balai/kantor bahasa dan seluruh tim kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Peserta dibekali dengan 18 materi pemetaan bahasa, baik teoretis maupun praktik bersama sejumlah narasumber ahli. Durasi pembelajaran materi pemetaan bahasa, baik daring maupun luring tersebut adalah 64 jam. Adapun gambaran materi dan narasumber yang terlibat, dilampirkan dalam jadwal dan notula yang disertai materi narasumber.

Pelaksanaan peningkatan kepakaran pemetaan sastra juga dimulai secara daring pada tanggal 23—26 Juli 2025 dan dilanjutkan pada tanggal 30 Juni hingga 3 Juli secara luring. Peserta kegiatan terdiri atas satu orang perwakilan dari balai/kantor bahasa dan seluruh tim kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Peserta dibekali dengan 16 materi pemetaan sastra, baik teoretis maupun praktik bersama sejumlah narasumber ahli. Durasi materi daring dan luring tersebut adalah 48 jam. Adapun gambaran materi dan narasumber yang terlibat, dilampirkan dalam jadwal dan notula yang disertai materi narasumber.



Gambar 6.2 DKT dan Peningkatan Kepakaran Pemetaan dalam Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara.

3. Pendampingan serta Pemantauan dan Evaluasi dalam Rangka Pengolahan Data Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara

Kegiatan Pendampingan serta Pemantauan dan Evaluasi dalam Rangka Pengolahan Data Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan lini masa yang ditentukan. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan hibrida di 30 UPT Badan Bahasa oleh tim yang terdiri atas satu orang tim teknis dari Pusbanglin dan satu orang dari tim ahli pemetaan bahasa. Pelaksanaan kegiatan merujuk pada petunjuk teknis untuk mengetahui bahwa tahapan pemetaan bahasa, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga pengolahan data, berjalan sesuai dengan ketentuan.

Selama pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana memberikan umpan balik langsung kepada setiap UPT mengenai pengumpulan data, kelengkapan kuesioner, dan ketepatan penginputan. Selain itu, dalam kegiatan ini, tim pelaksana juga melakukan (1) pemeriksaan kesesuaian hasil input pada data excel dengan kuesioner baku, (2) pengecekan penulisan fonetis yang meragukan disertai pengecekan data rekaman, (3) pengecekan TP pembandingan, (4) pengecekan data yang akan dihitung dalam dialektometri, (5) pengecekan data persiapan narasi, (6) pengisian instrumen pemantauan dan evaluasi pemetaan bahasa, serta (7) refleksi pelaksanaan pemetaan bahasa di UPT tahun 2025.

Analisa Dampak Manfaat

Program pemetaan bahasa, sastra, dan aksara oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memberikan manfaat besar dalam menjaga warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan relevan. Inisiatif ini menghasilkan peta kebhinekaan yang menjadi fondasi kuat untuk melindungi kekayaan linguistik daerah.

Fondasi Pelestarian Budaya

Pemetaan menyediakan data akurat tentang bahasa daerah, karya sastra, dan aksara lokal yang menjadi dasar kebijakan revitalisasi. Informasi ini memungkinkan verifikasi wilayah tutur serta sinkronisasi upaya konservasi secara efektif.

Penguatan Diplomasi Global

Hasil pemetaan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional, termasuk pengajuan aksara daerah ke UNESCO dan digitalisasi Unicode. Program ini menjadikan keberagaman bahasa sebagai prioritas strategis untuk pengakuan dunia.

Dukungan Pemerintah Daerah

Data pemetaan menjadi panduan langsung bagi pemerintah daerah untuk merancang program lokal pelestarian, seperti pengembangan pusat bahasa daerah dan festival sastra. Ini memfasilitasi alokasi anggaran tepat sasaran serta kolaborasi antar-daerah dalam menjaga identitas budaya.

Manfaat Pendidikan Nasional

Pemetaan menyediakan materi autentik untuk kurikulum pendidikan, termasuk pembelajaran bahasa daerah dan sastra lokal di sekolah. Siswa mendapatkan akses ke sumber belajar digital yang memperkaya pemahaman multikultural serta membangun generasi muda yang bangga akan keberagaman.

Dorongan Revitalisasi Lokal

Data ini mendorong partisipasi pemuda serta komunitas untuk memajukan identitas etnis melalui sastra lisan dan adaptasi sosial. Program memastikan warisan linguistik terus berkembang di tengah dinamika modern

Analisis Pendukung Ketercapaian Target Indikator Kinerja

Keberhasilan program ini lahir dari sinergi erat antara Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, balai bahasa provinsi, hingga komunitas adat yang melibatkan puluhan ribu informan dari Sabang hingga Merauke. Tim lapangan melakukan wawancara mendalam, observasi langsung di desa-desa terpencil, dan validasi silang data untuk menangkap nuansa bahasa yang hampir punah. Partisipasi aktif tokoh adat dan penutur asli memastikan autentisitas, sementara koordinasi pusat-daerah mengatasi tantangan logistik seperti akses medan sulit dan musim hujan. Hasilnya, data menjadi cerminan hidup kekayaan budaya yang siap digunakan untuk kebijakan nasional.

Tabel 7.3 Hambatan, Strategi Pencapaian, dan Langkah Antisipasi

Hambatan	Strategi Pencapaian	Langkah Antisipasi
Fasilitasi peningkatan kompetensi pelaksana tugas pemetaan bahasa dan sastra secara tatap muka langsung tidak dapat mengakomodasi seluruh pelaksana tugas pemetaan.	Penyelenggaraan peningkatan kompetensi secara hibrida (luring dan daring) bagi seluruh pelaksana tugas pemetaan bahasa dan sastra.	Pelaksana tugas pemetaan yang mengikuti peningkatan kompetensi secara luring wajib mengimbaskan materi dan informasi kepada rekan sejawat pelaksana tugas pemetaan yang hanya hadir secara daring.
Target usulan titik pengamatan balai/kantor bahasa belum memenuhi kriteria penentuan titik pengamatan yang ditetapkan	Merevisi titik pengamatan dengan bantuan aplikasi peta dan melakukan pembahasan secara intensif dan terjadwal, baik secara luring maupun daring	Penyelenggaraan diskusi kelompok terpumpun para ahli pemetaan bahasa guna mengambil keputusan nasional titik pengamatan di setiap provinsi wilayah kerja balai/kantor bahasa
Kompensasi terhadap keahlian pemberi informasi dan data bahasa (informan) belum memadai.	Menetapkan mekanisme pembayaran informan sebagai narasumber data bahasa.	Penyiapan panduan pelaksanaan yang mengatur perihal narasumber data bahasa.

SASARAN KEGIATAN

4 Meningkatkan tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama dalam pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat memengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma new public management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta new public service (governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa.

Hasil yang diharapkan dari penciptaan tata kelola yang baik melalui reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut yaitu dengan cara peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4.1

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tabel 8.1 Target dan Realisasi IKK
Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Tahun 2025			Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi	%		
4	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	4.1	Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	100%

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Indikator Perencanaan Anggaran dan Indikator Pelaksanaan Anggaran. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, Indikator Perencanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian

Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan Indikator Pelaksanaan Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

$$\text{Nilai NKA} = (50\% * \Sigma[\text{Perencanaan Anggaran}]) + (50\% * \Sigma[\text{Pelaksanaan Anggaran}])$$



Grafik 1.1 Perkembangan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Strategi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam meningkatkan pencapaian target kinerja nilai kinerja anggaran yaitu:

1. Meminimalkan deviasi rencana penarikan anggaran dengan memantapkan jadwal pelaksanaan kegiatan serta penyiapan tim keuangan yang tangguh;
2. Penguatan tata kelola keuangan terkait pertanggung jawaban keuangan yang tertib dan lancar disertai dengan peningkatan kompetensi bagi pengelola keuangan; dan
3. Pemetaan kegiatan yang menyeluruh dalam rangka menyiapkan data yang valid dan handal bagi pimpinan dalam menentukan/mengambil kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan/ anggaran.
4. Komitmen penanggungjawab kegiatan dan tim administrasi atas rencana penarikan dana setiap bulan
5. Melakukan revisi halaman III DIPA setiap triwulan
6. Melakukan revisi POK RKAKL berdasarkan usulan dari penanggungjawab kegiatan yang disetujui oleh PPK
7. Melakukan revisi rencana realisasi capaian output setiap triwulan
8. Melaporkan capaian output setiap bulan dengan tepat waktu
9. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran setiap triwulan
10. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 dan 2

Pencapaian target IKK Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra merupakan hasil koordinasi yang baik antara tim administrasi dengan tim kerja dan adanya dukungan serta pengawasan yang ketat oleh Pimpinan menjadikan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil meraih kategori sangat baik.

Tabel 8.2 Hambatan, Strategi Pencapaian, dan Langkah Antisipasi

Hambatan	Strategi Pencapaian	Langkah Antisipasi
Jadwal yang tidak proporsional dan inkonsistensi pelaksanaan jadwal kegiatan	Mengevaluasi dan mengatur ulang sisa jadwal kegiatan dan peneguran terhadap koordinator kegiatan oleh pimpinan	Menyusun jadwal kegiatan dari awal tahun dan diformalkan menjadi surat keputusan
Kegiatan dan realisasi anggaran baru terealisasi seluruhnya pada akhir tahun.	Pimpinan telah menegur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan agar realisasi output berjalan sesuai rencana dan tidak menumpuk di akhir tahun	Meningkatkan interval evaluasi dan pengawasan melalui rapat evaluasi setiap bulan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4.2

Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A

Tabel 8.3 Target dan Realisasi IKK
Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Tahun 2025			Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi	%		
4	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	4.2	Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	A	A	100%	AA	85%

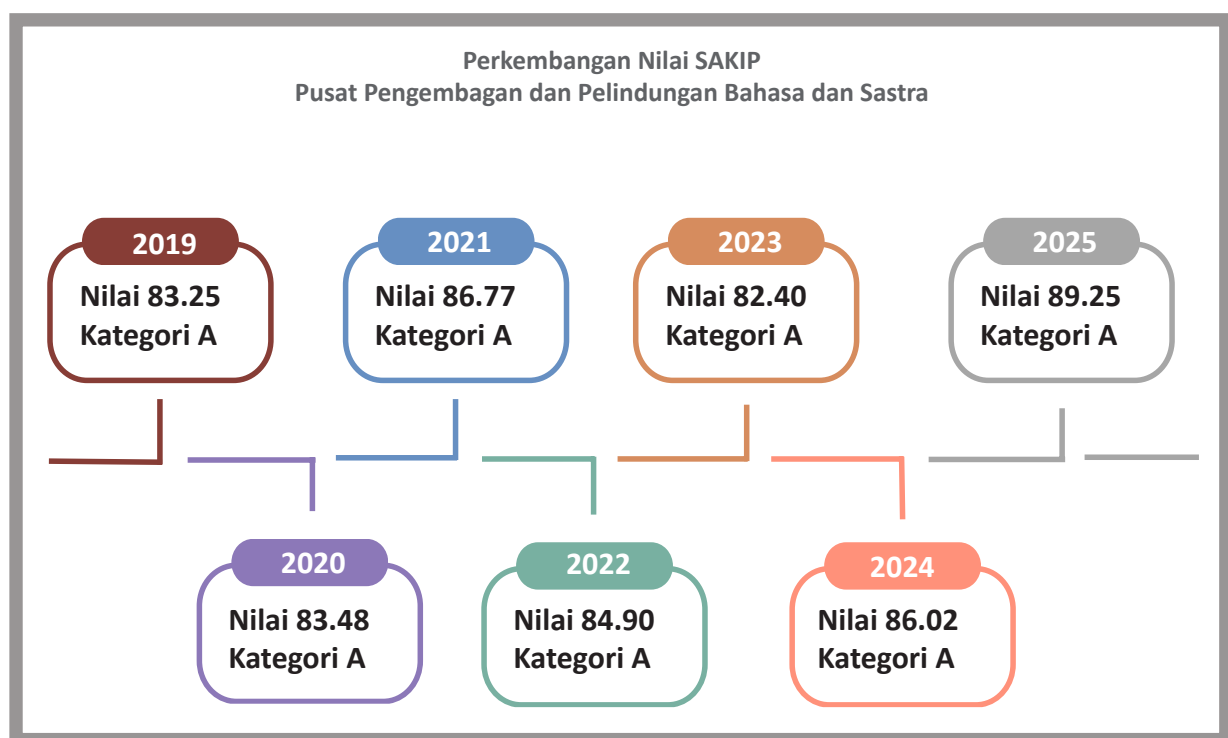
Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah

didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$



Gambar 7.1 Perkembangan nilai SAKIP

Target nilai SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dapat tercapai, bahkan melampaui target. Ketercapaian nilai/predikat SAKIP ini ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu:

1. Pembahasan draf revisi Renstra Badan Bahasa Tahun 2020—2024 dengan memperhatikan permasalahan pada Renstra terdahulu serta penyederhanaan sasaran dan indikator sesuai dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;

2. Penyusunan Renstra Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2025–2029;
3. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
4. Penyusunan perjanjian kinerja Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
5. Tindak lanjut Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya;
6. Pemutakhiran SOP pelaporan kinerja dan SOP penyusunan laporan kinerja disertai dengan kegiatan sosialisasi beserta implementasinya;
7. Melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan SKP;
8. Mengikuti pendampingan penilaian SAKIP oleh biro Perencanaan;
9. Pengukuran kinerja yang dilakukan, baik setiap bulan maupun triwulan; dan
10. Penyusunan laporan kinerja.

Keberhasilan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam pencapaian IKK Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A di tahun 2025 merupakan hasil dari kerjasama semua pihak baik dari internal berupa dukungan pimpinan dalam penyelenggaraan akuntabilitas, seluruh pegawai yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga pihak eksternal yaitu Sekretariat BPP Bahasa dan Biro Perencanaan Kemendikdasmen yang membantu mengawal dan memberikan pendampingan terhadap satker Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Hal-hal yang menjadi kendala dalam ketercapaian predikat SAKIP, yaitu kurangnya pemahaman dan perhatian akan pentingnya implementasi SAKIP sebagai instrument evaluasi pada suatu instansi, dan pemahaman subyektif auditor terkait butir evaluasi pada saat penilaian SAKIP.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antisipatif, yang meliputi peningkatan komunikasi dan koordinasi, baik di lingkungan internal maupun koordinasi dengan pihak eksternal, seperti Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Biro Perencanaan, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Anggaran, dan instansi terkait lainnya. Keikutsertaan staf dalam bimbingan SAKIP yang dilakukan oleh Pusdiklat dan Biro Perencanaan Kemendikdasmen pun menjadi salah satu upaya dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut. Selain itu, upaya sosialisasi mengenai pentingnya implementasi SAKIP pun dilakukan kepada internal Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Di samping itu, pengisian dokumen SAKIP dalam aplikasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal diupayakan agar dapat diisi sesuai periode waktu pengisiannya pada laman SPASIKITA Kemendikdasmen.

B. Realisasi Program dan Agenda Prioritas

Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional

Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) ini dirancang sebagai upaya strategis pemerintah dalam melestarikan, mengembangkan, dan menguatkan fungsi bahasa daerah melalui melibatkan generasi muda sebagai penutur aktif bahasa ibu. FTBIN berfungsi sebagai media apresiasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat sekolah atau komunitas belajar di kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Melalui festival ini, pemerintah mendorong tumbuhnya sikap bangga, cinta, dan komitmen generasi muda terhadap bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan kekayaan budaya bangsa.

Pelaksanaan FTBIN melibatkan kolaborasi multipihak, meliputi siswa, guru, komunitas bahasa dan sastra, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat. Beragam cabang perlombaan diselenggarakan secara kreatif dan interaktif, antara lain membaca dan menulis aksara daerah, menulis cerita pendek, membaca dan menulis puisi, mendongeng, pidato, tembang tradisi, serta komedi tunggal. Ragam kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan minat, kompetensi, dan partisipasi aktif generasi muda dalam penggunaan bahasa ibu di berbagai ranah.

Pada tahun 2025, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra kembali menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional dengan konsep hibrida. Konsep ini diterapkan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan capaian kinerja kegiatan.



Gambar 8.1 Kegiatan FTBIN 2025

Pemetaan Bahasa, Sastra, dan Aksara

Pemetaan bahasa merupakan upaya strategis pemerintah dalam menyediakan data kebahasaan yang mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perumusan kebijakan pelindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa daerah. Kegiatan pemetaan bahasa ini merupakan tindak lanjut dari pemetaan bahasa yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 1992 hingga 2019.

Tindak lanjut pemetaan bahasa menjadi kebutuhan mendesak mengingat bahasa bersifat dinamis dan terus berkembang seiring perubahan sosial, mobilitas penutur, serta pemekaran wilayah administratif. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian data bahasa dan persebarannya yang telah dihimpun sebelumnya tidak lagi sepenuhnya relevan dengan realitas kebahasaan di masyarakat saat ini.

Hingga saat ini, pemetaan bahasa telah menginventarisasi 718 bahasa daerah yang terpetakan. Namun, jumlah tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Penambahan jumlah bahasa dimungkinkan terjadi karena belum seluruh wilayah Indonesia berhasil diverifikasi, sehingga potensi bahasa yang belum terpetakan masih cukup tinggi, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan wilayah sekitarnya. Sebaliknya, pengurangan jumlah bahasa dapat terjadi akibat menurunnya jumlah penutur, pergeseran penggunaan bahasa daerah, hingga kepunahan

bahasa.

Dalam rangka memperluas cakupan data kebahasaan dan memotret persebaran variasi bahasa dilakukan pemetaan bahasa dengan menambah jumlah titik pengamatan. Capaian ini menunjukkan komitmen penguatan basis data kebahasaan nasional, meskipun masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan target nasional sebanyak 7.000 titik pengamatan. Saat ini data yang terkumpul baru di 2.560 titik pengamatan. Kesenjangan tersebut menjadi tantangan sekaligus agenda strategis ke depan untuk memastikan pemetaan bahasa dilakukan secara lebih merata, komprehensif, dan representatif terhadap kondisi kebahasaan di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui pemetaan bahasa yang berkelanjutan dan berbasis titik pengamatan yang memadai, diharapkan tersedia data kebahasaan yang akurat sebagai landasan pengambilan kebijakan perlindungan bahasa daerah, termasuk penentuan status vitalitas bahasa, perencanaan program revitalisasi, serta penguatan identitas dan kekayaan budaya bangsa.



Gambar 8.2 Peta Bahasa, Sastra, dan Aksara hasil pemetaan 2025



Gambar 8.3 Kegiatan pengolahan data hasil pemetaan

Sidang Komisi Istilah

Dalam rangka mengembangkan kosakata bahasa Indonesia diperlukan usaha pemerayaan kosakata yang dapat berupa penambahan jumlah kosakata, baik kosakata umum maupun kosakata khusus (istilah), dan penambahan daya ungkap melalui perluasan makna. Usaha tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal, seperti pakar-pakar bidang ilmu (Sidang Komisi Istilah) dan pihak internal (tim Perkamusan dan Peristilahan, baik yang berada di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra maupun di seluruh UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa). Pelibatan pakar bidang ilmu dalam pemerayaan kosakata bahasa Indonesia melalui SKI penting untuk menjamin ketepatan konseptual, konsistensi terminologi, dan relevansi penggunaan istilah.

Kegiatan SKI dilaksanakan oleh setidaknya 22 pakar dari berbagai bidang ilmu yang sudah ditentukan sebelumnya dalam satu kali sidang. Pakar bidang ilmu tersebut bekerja dalam kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta dibantu oleh ahli bahasa, sekretaris, dan pencatat. Pakar memiliki otoritas keilmuan dalam memahami konsep dan praktik pemakaian istilah di bidangnya, sehingga kosakata yang dirumuskan tidak hanya tepat secara linguistik, tetapi juga akurat secara substansial. Kolaborasi ini memperkuat legitimasi dan daya guna produk kebahasaan sebagai rujukan bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan komunikasi profesional. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melahirkan konsep, istilah, serta penamaan baru yang menuntut ketepatan makna, konsistensi penggunaan, dan kesesuaian konteks. Oleh karena itu, pelibatan pakar bidang ilmu menjadi prasyarat penting dalam memastikan bahwa kosakata yang dikembangkan memiliki landasan konseptual yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dalam setiap penyelenggaraan SKI, setiap kelompok diproyeksikan menghasilkan 800—900 istilah bidang ilmu asing yang sudah dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Hasil SKI menjadi bahan dasar untuk menyusun kamus bidang ilmu dan glosarium yang akan diterbitkan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.



Gambar 8.4 Kegiatan SKI 1 dan SKI 2

Seminar Leksikografi Indonesia

Seminar Leksikografi Indonesia (SLI) dirancang sebagai kegiatan strategis karena menjadi instrumen utama dalam merespons dinamika perkembangan bahasa yang dipengaruhi perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Perkembangan tersebut menuntut pemutakhiran berkelanjutan terhadap teori, metodologi, dan praktik perkamusan agar produk kodifikasi bahasa Indonesia tetap relevan, akurat, dan berdaya guna. SLI menyediakan ruang ilmiah yang melibatkan penyusun kamus, pakar kebahasaan, serta masyarakat peminat leksikografi untuk bertukar gagasan, pengalaman, dan temuan mutakhir. Forum ini memperkuat peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya

dalam penyusunan kamus, inventarisasi data leksikal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam perkamusan. Selain itu, SLI berfungsi sebagai wahana diseminasi pengembangan bahasa kepada masyarakat luas. Sejak dilaksanakan pertama kali pada tahun 2018, SLI selalu berhasil menarik minat masyarakat peminat leksikografi. Hal ini terlihat dari tren jumlah peserta dan pemakalah yang meningkat di setiap tahun penyelenggaraannya. Keterlibatan komunitas peminat kamus menjadikan pengembangan bahasa bersifat partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Melalui penyelenggaraan SLI, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berupaya berbagi pengalaman dan informasi mutakhir serta menyosialisasikan perkembangan dunia leksikografi kepada masyarakat. Kegiatan ini menghimpun pekamus, pegiat bahasa, dan masyarakat peminat kamus dalam rangka memperkuat peran leksikografi sebagai dasar penyusunan kamus dan pengembangan kosakata bahasa Indonesia

Kolaborasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam Percepatan Pembangunan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Tanah Papua

Di Tanah Papua, keragaman bahasa daerah mencerminkan kekayaan dan aset bangsa yang luar biasa—lebih dari empat ratus bahasa daerah hidup dan berkembang di wilayah Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Namun, sebagian besar bahasa tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat menurunnya penutur, perubahan pola hidup, serta terbatasnya dukungan kebijakan daerah.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam pelindungan dan pengembangan bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (Pusbanglin) dan Balai Bahasa di wilayah Papua berkomitmen untuk memperkuat upaya pelindungan bahasa daerah. Salah satu strategi yang ditempuh ialah menjalin kolaborasi dengan lembaga-lembaga strategis yang memiliki mandat pembangunan daerah, termasuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

BP3OKP memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan wilayah Otonomi Khusus Papua, termasuk dalam bidang sosial, budaya, dan sumber daya manusia. Kolaborasi antara Badan Bahasa dan BP3OKP menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pelindungan bahasa daerah dapat berjalan seiring dengan percepatan pembangunan dan penguatan identitas masyarakat Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai langkah konkret menjalin sinergi di wilayah Otsus Papua secara berkelanjutan dalam kegiatan Pra-Rapat Koordinasi Teknis (Pra-Rakortek) yang diselenggarakan sebagai ruang penyamaan persepsi, pembahasan awal substansi rencana induk, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, antara lain Badan Bahasa, BP3OKP, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi, dinas pendidikan, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta perwakilan komunitas bahasa dan pemangku adat. Pra-Rakortek tersebut menghasilkan komitmen perjanjian kerja sama dan merumuskan pembagian peran yang jelas antar-lembaga serta menyusun peta jalan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Tanah Papua yang menjadi dasar komitmen bersama.



Gambar 8.5 kegiatan Pra-Rapat Koordinasi Teknis (Pra-Rakortek)

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran tahun 2025 pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menunjukkan kinerja yang efektif dan akuntabel. Realisasi anggaran mencapai tingkat serapan yang optimal dan sejalan dengan capaian output yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengelolaan anggaran dilakukan melalui perencanaan yang terarah, pengendalian internal yang konsisten, serta penyesuaian kegiatan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program.

Pagu anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp32.820.479.000,00. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp32.000.397.211,00 dengan persentase daya serap sebesar 97,50%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian tiga sasaran kegiatan dengan 5 indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja

Tabel 9.1 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	Rp4.605.048.000	Rp4.442.621.971	96,47%
Belanja Barang	Rp27.285.431.000	Rp26.627.775.240	97,59%
Belanja Modal	Rp930.000.000	Rp930.000.000	100,00%
Total	Rp32.820.479.000	Rp32.000.397.211	97,50%

Tabel 9.2 Realisasi Anggaran per IKK

Kode	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target	Realisasi	%
SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik			
IKK	Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Rp1.100.000.000	Rp1.055.320.140	95,94

SK	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra			
IKK	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Rp12.832.615.000	Rp12.512.573.301	97,51
SK	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra			
IKK	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Rp3.918.515.000	Rp3.793.685.842	96,81
SK	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas			
IKK	Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Rp3.298.808.000	Rp3.287.375.971	99,65
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra			
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp636.823.000	Rp584.472.034	91,78
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	Rp11.033.718.000	Rp10.766.969.923	97,58

Pagu anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam DIPA awal tahun 2025 adalah sebesar 42.753.480.000,00. Pusbanglin mengalami 7 kali revisi pagu, hingga pagu anggaran terakhir menjadi 32.820.479.000,00.



Gambar 9.1 Perkembangan DIPA Tahun Anggaran 2025

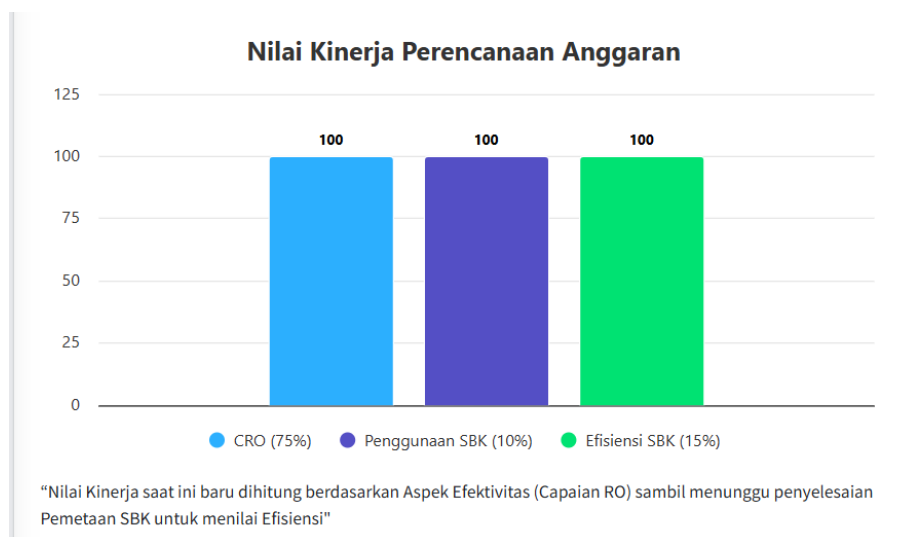
2. Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 menunjukkan bahwa Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mampu mencapai target kinerja secara efektif dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik. Realisasi anggaran Rp32.000.397.211,00 berada di bawah pagu yang telah ditetapkan Rp32.820.479.000,00, tanpa mengurangi kualitas keluaran (output) maupun hasil (outcome) yang direncanakan. Efisiensi tersebut terutama diperoleh melalui optimalisasi proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi, pengurangan biaya non-prioritas, serta konsolidasi kegiatan yang memiliki kesamaan sasaran.

Meskipun terjadi penghematan anggaran, capaian kinerja tetap berada pada atau di atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil menerapkan prinsip value for money, yaitu mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menggambarkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi hasil, serta mendukung upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program sesuai arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Berdasarkan penilaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dapat dilihat melalui situs monev.kemenkeu.go.id, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memperoleh bobot efisiensi sebesar 100. Efisiensi ini didapat dari penggunaan SBKU berupa layanan BMN, aturan terkait efisiensi ini ada pada dokumen Keputusan Menteri Keuangan Nomor 366 tahun 2023..



Gambar 9.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2025

Tabel 10.1 Analisa strategi efisiensi tiap IKK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase	
			Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran
1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	25	Rp1.100.000.000	28,55	Rp1.055.320.140	114	95,94

	Strategi yang dilakukan Satker	Strategi capaian lebih dari target dan mendukung efisiensi anggaran yaitu mengalihkan sisa anggaran belanja modal pemutakhiran aplikasi SIPEBI yang tidak dapat digunakan dan digunakan untuk kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang berdampak untuk meningkatkan pengguna produk pengembangan.						
2	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	11,55	Rp12.832.615.000	14,06	Rp12.512.573.301	121	97,51
	Strategi yang dilakukan Satker	Strategi capaian lebih dari target dan mendukung efisiensi anggaran yaitu mengoptimalkan perencanaan kegiatan yang baik dari awal tahun dan memastikan jadwal kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, selain itu juga melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas.						
3	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	6,4	Rp3.918.515.000	7,1	Rp3.793.685.842	110	96,81
	Strategi yang dilakukan Satker	Strategi capaian lebih dari target dan mendukung efisiensi anggaran yaitu mengoptimalkan perencanaan kegiatan yang baik dari awal tahun dan memastikan jadwal kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, selain itu juga melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas, dan melakukan komunikasi yang intens dengan para tim pemetaan di balai/kantor BPP Bahasa dan melakukan Pendampingan serta Pemantauan dan Evaluasi dalam Rangka Pengolahan Data Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara untuk memastikan agar kegiatan pemetaan berjalan dengan maksimal.						
4	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Sangat baik (91)	Rp636.823.000	Sangat baik (95,98)	Rp584.472.034	100	91,78
	Strategi yang dilakukan Satker	Strategi capaian lebih dari target dan mendukung efisiensi anggaran yaitu mengoptimalkan perencanaan kegiatan yang baik dari awal tahun dan memastikan jadwal kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, menyusun semua dokumen perencanaan dengan cermat dan tepat waktu, mengikuti pendampingan SAKIP, dan rapat berkala untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran.						
5	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	A	Rp11.033.718.000	A	Rp10.766.969.923	100	97,58
	Strategi yang dilakukan Satker	Strategi capaian lebih dari target dan mendukung efisiensi anggaran yaitu mengoptimalkan perencanaan kegiatan yang baik dari awal tahun dan memastikan jadwal kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, memastikan semua proses keuangan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan, dan Koordinasi yang intens antara KPA, PPK, dan Tim Keuangan						

Efisiensi pelaksanaan program di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2025 tidak hanya dicapai melalui optimalisasi capaian program dan realisasi anggaran, tetapi juga melalui penguatan tata kelola sumber daya manusia. Upaya efisiensi ditunjang oleh langkah strategis berupa pemetaan jabatan, kompetensi, dan peminatan setiap pegawai sehingga penugasan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Penataan ini diwujudkan dalam pembagian peran yang jelas pada tim kerja maupun kelompok jabatan administrasi, sehingga setiap SDM dapat berkontribusi sesuai kapasitas dan keahliannya.

D. Kinerja Lain-Lain

1. Reformasi Birokrasi (ZI-WBK)

Pada tahun 2025 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mendapat kesempatan dalam penilaian predikat ZI-WBK, namun Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tetap menetapkan tim kerja ZI-WBK yang dievaluasi kinerjanya setiap tahun. Di samping itu, sebagai parner model anutan dalam menggerakkan perubahan (katalis) dan mediator, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra membentuk agen perubahan yang mewakili setiap tim kerja dengan program aksi yang berangkat dari kebutuhan tim kerja tersebut sehingga dampak perubahan akan lebih dirasakan, pemberian motivasi melalui kutipan harian, pojok literasi, serta pendampingan dan magang penyusunan kamus bagi UPT Balai/Kantor se-Indonesia. Pusbanglin melalui tim ZI-WBK menetapkan sejumlah program kerja prioritas di setiap area serta program prioritas utama sepanjang 2025 yang dikenal dengan Lima Aksi Juara Pusbanglin. Lima Aksi Juara Pusbanglin ini terdiri atas 1) Pusbanglin Mengapresiasi, 2) Pusbanglin Peduli, 3) Pusbanglin Harmonis, 4) Pusbanglin Informatif, dan 5) Pusbanglin Mengabdi. Secara rinci Lima Aksi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pusbanglin Mengapresiasi, Lima pegawai dengan peringkat teratas dalam penilaian log-harian akan diumumkan setiap bulan setelah proses penilaian selesai. Pengumuman akan diumumkan di papan pengumuman elektronik atau pengumuman suara di pagi hari untuk menambah semangat pegawai sebelum memulai aktivitas bekerja di kantor .
2. Pusbanglin Peduli merupakan bentuk kepedulian sosial yang tinggi kepada rekan kerja dan masyarakat yang mengalami musibah. Aksi diwujudkan dalam bentuk bakti sosial, bantuan sosial, tali kasih kedukaan dan tanda kasih selama menginap di rumah sakit.
3. Pusbanglin Harmonis, Pusbanglin memberi ruang dan kesempatan bagi semua pegawai untuk berkumpul dan berdiskusi dengan cara yang menyenangkan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kolaborasi antara tim kerja teknis dan tim kerja administrasi dengan bahan diskusi yang beraneka ragam, seperti guyub di acara keagamaan, diskusi ilmu antar-tim kerja, dan sebagainya, dalam bentuk NGOBRAS (Ngobrol Santai).
4. Pusbanglin Informatif yaitu Pegawai atau tim kerja yang sedang melaksanakan kegiatan wajib menyusun berita kegiatan untuk diunggah ke laman publikasi Pusbanglin. Laman Pusbanglin juga digunakan sebagai sarana berbagi ilmu atau kutipan motivasi oleh Agen Perubahan.
5. Pusbanglin Mengabdi dilakukan oleh pimpinan beserta seluruh jajarannya mengabdikan diri dengan membawa tanaman dalam pot, buku motivasi berkinerja, dan/atau membagikan ilmu/skil/keterampilan kepada seluruh warga Pusbanglin. Pengabdian ini dikhususkan bagi pimpinan dan pegawai yang terlambat hadir lebih dari satu kali (1x) dalam sepekan.

Namun tahun ini Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra masih belum berhasil mendapatkan predikat ZI-WBK karena tidak dijadikan sebagai satker yang dinilai, tapi semua upaya akan tetap dipertahankan agar saat mendapatkan kesempatan kembali, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dapat meraih predikat ZI-WBK

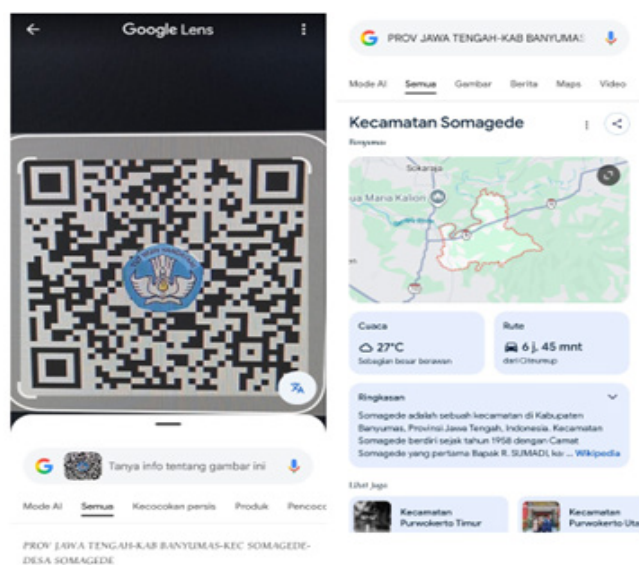
2. Inovasi

Pada tahun 2025, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melakukan inovasi sebagai berikut

a. Alih media data peta bahasa

Pengalihmediaan kuesioner pemetaan dari versi cetak ke bentuk digital merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan data kebahasaan. Melalui pendigitalan, proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan informasi menjadi lebih efisien sekaligus responsif terhadap kebutuhan zaman. Sistem digital memungkinkan data disimpan secara terstruktur dalam platform berbasis cloud atau server terpusat sehingga memudahkan akses lintas wilayah, mempercepat verifikasi, dan mengurangi ketergantungan pada arsip fisik yang rentan.

Pendigitalan ini juga menjadi langkah antisipatif yang strategis terhadap berbagai risiko hilangnya dokumen, baik akibat bencana alam seperti banjir maupun kekhilafan petugas dalam pengarsipan. Dengan sistem penyimpanan digital yang memiliki fitur backup berkala, dan keamanan berlapis, kerusakan fisik maupun kehilangan dokumen dapat diminimalkan secara signifikan. Dengan demikian, inovasi ini bukan hanya meningkatkan efisiensi dan mutu proses pemetaan, tetapi juga memperkuat ketahanan data kebahasaan dalam jangka panjang.



Gambar 10.1 Tampilan Wilayah Titik Pengamatan Pemetaan Bahasa melalui Google Lens

b. Bineka

Program Bineka (Bingkai Indonesia dalam Aneka Bahasa dan Sastra) merupakan inovasi dari dua layanan yang diberikan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, yaitu Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra serta Kamus Masuk Sekolah. Inovasi ini bertujuan untuk mendekatkan produk-produk kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat, khususnya pelajar tingkat dasar dan menengah. Lab Bineka merupakan wahana belajar tentang kekayaan dan keberagaman bahasa dan sastra Indonesia yang terletak di kantor Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sehingga program ini pada mulanya bersifat statis atau terpusat. Layanan ini kemudian dikembangkan agar dapat menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, Kamus Masuk Sekolah merupakan kegiatan pengenalan produk kamus ke satuan pendidikan. Layanan ini dilaksanakan secara berger-

ak menggunakan unit kendaraan keliling dengan dukungan modul interaktif, gim edukatif, serta fasilitasi dan advokasi bahasa dan sastra. Program ini mampu menjangkau masyarakat secara langsung, menghadirkan pengalaman kebinekaan secara nyata, membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian bahasa dan sastra, serta meningkatkan kecakapan literasi siswa melalui kemampuan merujuk (reference skill).



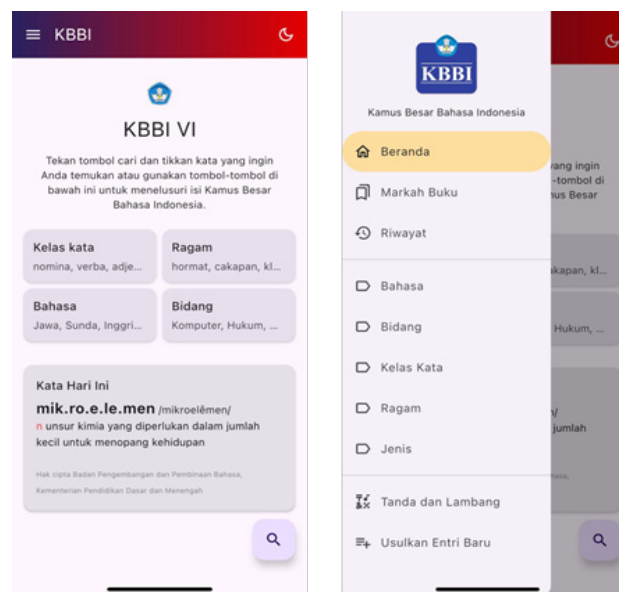
Gambar 10.2 Kegiatan Bineka

c. Fasilitasi pemanfaatan produk pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra (perhitungan nasional/provinsi)

Kegiatan fasilitasi pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra ini bertujuan untuk memperkenalkan komik dan cerita bergambar sebagai bahan bacaan yang ringan, tetapi bermakna. Selain memperluas wawasan dan minat baca, peserta juga akan diajak menjadi kreator aktif melalui kegiatan menulis alur cerita sederhana hingga membuat komik strip. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra visual, tetapi juga melatih keterampilan berpikir kreatif, kolaboratif, dan produktif. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda yang mampu menjadikan literasi sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Membaca bukan lagi kewajiban, melainkan sumber inspirasi, hiburan, dan pengembangan diri. Setiap cerita yang mereka baca dan ciptakan hari ini adalah langkah kecil menuju terbentuknya budaya literasi yang kuat, yang akan menjadi modal penting bagi pembangunan bangsa di masa depan

d. Pengembangan KBBI luring versi IOS

Pengembangan KBBI luring versi iOS dilakukan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap rujukan utama bahasa Indonesia melalui perangkat bergerak berbasis iOS. Aplikasi ini menyediakan fitur pencarian lema yang cepat dan mudah digunakan, disertai pembaruan data kebahasaan secara berkala serta antarmuka yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pada pengembangan tahun 2025, KBBI versi iOS menghadirkan tampilan Kata Hari Ini, Usulkan Entri Baru, Tanda dan Lambang, dan Buat Daftar yang memungkinkan pengguna mendaftarkan diri ke KBBI Daring dan berpartisipasi aktif dalam pengayaan kosakata bahasa Indonesia, menambah literasi kata, dan mencatat kosakata dalam daftar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kehadiran KBBI luring versi iOS mendukung pemanfaatan bahasa Indonesia secara tepat dalam kegiatan pembelajaran, penulisan, dan literasi digital, sekaligus memperkuat layanan kebahasaan di ruang digital.



Gambar 10.3 Tampilan aplikasi KBBI Daring IOS

e. Penyusunan Kamus Penunjang Pendidikan berilustrasi

Kamus Penunjang Pendidikan adalah jenis kamus yang disusun untuk mendukung proses pembelajaran di lingkungan pendidikan formal dan nonformal. Pada tahun 2025, penyusunan Kamus Penunjang Pendidikan berfokus pada produk Kamus Idiom dan Kamus Peribahasa yang dilaksanakan secara swakelola dan melalui pihak ketiga. Kamus Idiom berisi 35 idiom yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, disertai arti, contoh kalimat, dan gambar pendukung yang memudahkan pemahaman. Kamus Peribahasa disusun untuk membantu pelajar memahami makna dan nilai-nilai dalam peribahasa Indonesia secara mudah, menarik, dan menyenangkan. Setiap peribahasa dikemas dalam bentuk komik edukatif yang menggambarkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kamus Peribahasa memuat 25 peribahasa yang hidup dan digunakan dalam masyarakat Indonesia. Kamus Peribahasa memperkaya sumber belajar bahasa Indonesia serta mendukung pembentukan karakter dan literasi bahasa peserta didik siswa sekolah dasar terutama kelas 4—6 SD



Gambar 10.4 Sampul Kamus Idiom Bergambar dan Kamus Peribahasa Bergambar



Gambar 10.5 Kegiatan uji keterbacaan

3. Penghargaan

Pada tahun 2025 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tidak memiliki penghargaan yang diberikan baik di internal maupun di luar/eksternal Kemdikbudristek. Keadaan ini tentunya memacu Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk lebih berkomitmen dalam berkinerja agar lebih baik di masa yang akan datang.

4. Program Crosscutting/Collaborative

Program kolaborasi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2025 dalam hal pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra adalah sebagai berikut.

a. Pembuatan Produk Pemodernan Sastra/Alih Wahana Karya Sastra

Pada tahun 2025, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra kembali melakukan pembuatan produk pemodernan sastra/alih wahana karya sastra dalam bentuk komik. Dalam pembuatannya, Pusbanglin bekerja sama dengan para praktisi, dari mulai penulis sampai dengan penata warna yang tergabung dalam Octopus Garden. Pemilihan Octopus Garden dilakukan dengan mekanisme pengadaan melalui e-katalog.

Octopus Garden adalah penerbit komik Indonesia yang fokus pada karya komikus lokal dengan ciri khas unik. Octopus Garden dikenal aktif menampilkan IP (intellectual property) komik lokal di kancah internasional, seperti Singapore Comic Con. Beberapa nama besar komikus yang bernaung di bawah Octopus Garden, yaitu Muhammad “Mice” Misrad, Beng Rahadian, dan Sheila R. Putri. Beberapa komik telah yang diterbitkan Octopus Garden, antara lain Mice Cartoon, Komik Jakarta: Kiri Kanan Jakarta, dan Hitam Jahanam.

Dalam pembuatan produk pemodernan sastra/alih wahana karya sastra tersebut, Octopus Garden berperan sebagai tim produksi. Pusbanglin menyediakan daftar sumber cerita yang dapat dikembangkan menjadi komik yang berasal dari 34 provinsi. Setelah menerima daftar sumber cerita yang akan dialihwahanakan, Octopus Garden kemudian melakukan riset untuk menyusun premis dan naskah serta pengembangan desain visual karakter dalam komik. Produksi yang dilakukan oleh Octopus Garden meliputi penulisan naskah, pembuatan papan cerita (storyboard), pembuatan lineart, pewarnaan, tata aksara, desain sampul, dan penerbitan dumi.

b. Penyediaan Data Korpus Bahasa Daerah

Korpus adalah kumpulan teks alami, baik lisan maupun tulis, yang disusun secara sistematis sebagai sumber data untuk melatih model kecerdasan buatan agar memahami dan memproses bahasa manusia. Inisiatif ini bertujuan mendokumentasikan, mempelajari, dan melestarikan bahasa daerah, terutama yang terancam punah. Penyediaan korpus bahasa daerah menjadi langkah penting untuk mengamankan unsur-unsur vital suatu bahasa sebelum benar-benar punah. Korpus mencakup dokumentasi komprehensif meliputi tata bahasa, kosakata, hingga konteks penggunaannya. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti bahan ajar, media berbahasa daerah, dan program pendidikan berbasis bahasa lokal. Selain itu, korpus ini mendukung pengajaran bahasa daerah di sekolah agar lebih efektif, membantu bahasa daerah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan memperluas penggunaannya melalui media massa. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan,

korpus bahasa daerah juga berperan penting dalam menciptakan sumber daya digital yang mendukung pelestarian bahasa secara berkelanjutan. Perpustakaan Nasional berperan sebagai penyedia data set dan/atau infrastruktur digital, bekerja sama dengan pengembang pihak ketiga dalam pengembangan perangkat lunak dan teknologi AI untuk mendukung penyusunan korpus bahasa daerah.

Dalam penyusunan korpus bahasa daerah, Pusbanglin memerlukan sejumlah data yang tidak bisa hanya diperoleh melalui produk-produk Badan Bahasa. Untuk keperluan penyediaan bahan dan data tersebut, Pusbanglin berkolaborasi dengan Perpustakaan Nasional RI, terutama Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan. Perpustakaan Nasional RI berperan menyediakan hasil digitalisasi dan alih media bahan perpustakaan berbahasa daerah. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi data korpus berbahasa daerah.

c. Pelibatan Editor Eksternal dalam Pemutakhiran KBBI Daring

Pengerjaan pemutakhiran KBBI memerlukan waktu pengerjaan yang panjang, yakni sepanjang tahun, karena usulan yang masuk ke dalam KBBI Daring sangat banyak. Sejak KBBI Daring diluncurkan pada 28 Oktober 2016, jumlah usulan yang masuk lebih dari 200.000 usulan, baik berupa usulan entri baru maupun perbaikan entri dalam KBBI. Usulan yang masuk ini sebagian besar merupakan usulan kosakata bahasa daerah dari Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia. Pelibatan editor terpilih bertujuan untuk melakukan pemercepatan penambahan dan penyuntingan entri pada KBBI Daring. Editor eksternal terpilih merupakan pengguna aktif KBBI Daring yang dibuktikan dengan kepemilikan akun KBBI dan keaktifan dalam memberi usulan entri baru, memahami prinsip dasar penyusunan kamus, dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang bahasa menjadi nilai tambah. Pada tahun 2025 sebanyak 5 editor eksternal dilibatkan untuk mengusulkan dan menyunting masing-masing 1000 entri pada KBBI Daring

d. Kuliah Umum Kebahasaan II

Penyelenggaraan Kuliah Umum Kebahasaan II yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2025 menjadi ruang kolaboratif antara Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, KITLV Jakarta, dan Wacana Universitas Indonesia dalam memperkuat dialog kebahasaan yang berakar pada kajian ilmiah dan pengalaman lintas institusi. Kerja sama ini mempertemukan perspektif kebijakan, riset, dan akademik dalam satu forum yang berupa kuliah umum kebahasaan untuk memperkaya pemahaman serta praktik pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menjadi fasilitator kegiatan serta memastikan agar tema dan materi kuliah umum selaras dengan kebutuhan strategis kebijakan kebahasaan nasional. Kontribusi KITLV Jakarta adalah penyediaan narasumber dan penyajian sudut pandang riset yang berbasis pengalaman internasional. Peran ini memberikan konteks perbandingan dan kedalaman analisis yang memperluas cakrawala peserta terhadap isu-isu kebahasaan. Sementara itu, Wacana UI menghadirkan kekuatan akademik nasional dengan mengaitkan teori linguistik dan kajian humaniora dengan dinamika kebahasaan sekaligus mendorong keterlibatan aktif civitas akademika dalam diskursus kebahasaan.

Kolaborasi ini bermanfaat bagi terciptanya ruang pertukaran gagasan yang mempertemukan pemangku kepentingan kebahasaan, akademisi, pegiat bahasa dan sastra, dan masyarakat umum dari berbagai latar belakang. Kuliah Umum Kebahasaan II berfungsi sebagai forum pengayaan wawasan sekaligus penguatan jejaring kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga riset, dan perguruan tinggi. Dari sisi dampak, kegiatan ini berkontribusi pada meningkatnya kualitas perumusan kebijakan kebahasaan yang berbasis kajian ilmiah, terbangunnya hubungan kemitraan yang lebih erat dan berkelanjutan antar lembaga, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya integrasi riset dan akademisi dalam upaya

pelindungan dan pengembangan bahasa dan sastra di Indonesia

e. Bineka (Lab Bineka dan Kamus Masuk Sekolah)

Kolaborasi antara Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terjalin secara strategis dalam pelaksanaan kegiatan Bineka Keliling dan Kamus Masuk Sekolah sebagai upaya bersama memperkuat literasi kebahasaan dan kesadaran multikultural di satuan pendidikan. Dalam kolaborasi ini, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berperan sebagai penggagas program, penyedia materi kebahasaan dan fasilitator, serta pendamping substansi kegiatan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berperan penting sebagai penghubung dengan ekosistem pendidikan daerah, termasuk dalam penetapan sekolah sasaran, koordinasi dengan kepala sekolah dan guru, serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Peran aktif Dinas Pendidikan memastikan bahwa program Bineka Keliling dapat diintegrasikan dengan konteks pembelajaran di sekolah serta menjangkau peserta didik secara luas dan merata. Pada kegiatan Kamus Masuk Sekolah, Dinas Pendidikan turut mendukung pemanfaatan kamus sebagai sumber belajar di kelas melalui sosialisasi kepada guru dan peserta didik sehingga kamus tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga alat pembelajaran yang digunakan secara berkelanjutan. Manfaat kolaborasi ini terlihat pada meningkatnya pemahaman peserta didik terhadap keberagaman bahasa di Indonesia, tumbuhnya sikap apresiatif terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia, serta menguatnya budaya literasi di sekolah. Bagi pemerintah daerah, kerja sama ini mendukung penguatan kebijakan pendidikan berbasis kebahasaan, sedangkan bagi pemerintah pusat, kolaborasi dengan dinas pendidikan memastikan program nasional dapat diimplementasikan secara kontekstual, efektif, dan berdampak nyata di satuan pendidikan. Dampak jangka panjangnya adalah terbentuknya ekosistem pendidikan yang mendukung literasi bahasa, penguatan identitas kebahasaan, serta kontribusi nyata terhadap pengembangan dan pelindungan bahasa secara berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan tingkat keberhasilan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

Melalui evaluasi ini, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berkomitmen untuk memperkuat langkah peningkatan kinerja di tahun berikutnya, termasuk penguatan tata kelola, efektivitas program, serta efisiensi pemanfaatan anggaran. Laporan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan perencanaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja semakin selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Selama tahun 2025, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Kode	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
SK	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik				
IKK	Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	25	28,55	114
SK	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra				
IKK	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persentase	11,55	14,06	121
SK	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra				
IKK	Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persentase	6,4	7,1	110
SK	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra				
IKK	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	100
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	Predikat	A	A	100



B. Fokus Perbaikan

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh berbagai faktor. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2024 telah berupaya secara maksimal melakukan peningkatan kinerja melalui berbagai macam metode. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen bersama pimpinan dan seluruh staf pegawai.

Beberapa hal yang sudah dilakukan di tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari fokus perbaikan yang dituangkan di Laporan Kinerja tahun 2024, antara lain:

No	Catatan tahun 2024	Tindak lanjut tahun 2025
1.	Memantapkan konsep dan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, pelaksana kegiatan, dan pakar/narasumber.	Pada tahun 2025 sebagai upaya untuk menselaraskan pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang ditentukan, sudah dibuat SK terkait jadwal 1 tahun dan dimonitoring setiap triwulan
2.	Membangun komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan yang relevan	pada tahun 2025, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melibatkan pakar dalam setiap tahapan program pemetaan bahasa, sastra, dan aksara agar program bisa terlaksana dengan baik
3.	Mengintensifkan kolaborasi dengan melibatkan unsur-unsur pentaheliks (pemerintah, akademisi, badan usaha/ industri, masyarakat/komunitas, dan media).	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di tahun 2025 memiliki beberapa program yang bekerja sama dengan pihak pemerintah (Kamus masuk sekolah, Pra Kongress), lalu dengan pihak media terkait kegiatan fasilitasi, dan para akademisi terkait penyusunan kamus dan penginventarisasian kosakata.

4.	Melakukan koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksana kegiatan dengan tim administrasi Tata Usaha	Pada tahun 2025 koordinasi dilakukan setiap triwulan dengan dasarnya dari SK jadwal yang sudah dibuat.
5.	Melakukan evaluasi dan monitoring progres pelaksanaan program kegiatan dan anggaran secara berkala setiap akhir bulan	Pada tahun 2025 evaluasi masih dilakukan setiap triwulan saja, namun pada tahun 2025 rapat evaluasi triwulan dihadiri oleh seluruh pegawai, bukan hanya ketua tim kerja atau penanggungjawab
6.	Peningkatan kompetensi bagi seluruh pegawai baik teknis maupun administrasi	Pada tahun 2025, dalam rangka meningkatkan kompetensi terkait pemetaan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengadakan kegiatan peningkatan kepakaran dalam pemetaan bahasa, sastra, dan aksara

Dari hasil evaluasi kinerja, walaupun sudah ditindaklanjuti, ternyata poin-poin di atas masih ada yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena itu masih perlu mendapat perhatian dan beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan dalam meningkatkan kinerja organisasi antara lain:

1. Memantapkan konsep dan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, pelaksana kegiatan, dan pakar/narasumber.
2. Membangun komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan yang relevan
3. Mengintensifkan kolaborasi dengan melibatkan unsur-unsur pentaheliks (pemerintah, akademisi, badan usaha/industri, masyarakat/komunitas, dan media).
4. Melakukan koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksana kegiatan dengan tim administrasi Tata Usaha.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring progres pelaksanaan program kegiatan dan anggaran secara berkala setiap akhir bulan.
6. Peningkatan kompetensi bagi seluruh pegawai baik teknis maupun administrasi.

LAMPIRAN

- Perjanjian kinerja Awal
- Perjanjian Kinerja Akhir
- Pengukuran Kinerja
- SK Tim Penyusun Laporan Kinerja
- SK Tim Reviu Laporan Kinerja
- Lembar Kerja Reviu Laporan Kinerja
- Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

PERJANJIAN KINERJA AWAL



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dora Amalia
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bogor, 1 Agustus 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Hafidz Muksin

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dora Amalia



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	12.96
[SK 2] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 2.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	11.55
[SK 3] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 3.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persen	2.8
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 4.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Rp12.934.346.000
2	7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	Rp17.622.919.000
3	7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp12.196.215.000
Total Anggaran			Rp42.753.480.000

Bogor, 1 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Hafidz Muksin



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dora Amalia



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

PERJANJIAN KINERJA AKHIR



Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dora Amalia
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bogor, 18 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Hafidz Muksin

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dora Amalia



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	25
[SK 2] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 2.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	11.55
[SK 3] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 3.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persen	6.4
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 4.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Rp7.217.323.000
2	7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	Rp13.932.615.000
3	7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp11.670.541.000
Total Anggaran			Rp32.820.479.000

Bogor, 18 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa

Hafidz Muksin



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra

Dora Amalia



Catatan:

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

PENGUKURAN KINERJA



Laporan Kinerja Triwulan 4 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik				
[IKK 1.1] Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	12.96	Persen	12.96	28.55
[SK 2] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra				
[IKK 2.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	11.55	Persen	11.55	14.06
[SK 3] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra				
[IKK 3.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	2.8	Persen	2.8	7.1
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra				
[IKK 4.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik
[IKK 4.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	A	Predikat	A	A

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik **[IKK 1.1] Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik**

Progress/Kegiatan

Definisi:

Persentase pengembangan produk bahasa dan sastra yang dimanfaatkan oleh peserta didik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi produk hasil pengembangan bahasa dan sastra (seperti kamus, pedoman, cerita bergambar, dan komik) yang telah digunakan, dibaca, atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar, literasi, atau kegiatan lainnya oleh peserta didik pada jenjang dasar dan menengah.



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Terdapat penyesuaian terhadap target yang mengakibatkan targetnya naik karena Usulan perubahan target IKK Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik dari 12,96% menjadi 25% didasarkan pada hasil peninjauan ulang atas upaya intervensi kegiatan yang telah dilakukan oleh Pusbanglin untuk menunjang pencapaian indikator pada indeks ini. Intervensi kegiatan tersebut menunjukkan bahwa telah ada upaya dari Pusbanglin yang memberikan hasil positif terhadap persentase pemanfaatan produk pengembangan oleh peserta didik yang telah ditargetkan atau diasumsikan sebelumnya. Dengan demikian, penyesuaian target menjadi 25% dilakukan agar dapat dipastikan kondisi riil dan terkini pemanfaatan buku di lapangan serta pengukuran kinerja yang lebih akurat, proporsional, dan selaras dengan capaian aktual dapat dipastikan

Metode Penghitungan:

Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan Peserta Didik (PPDP) diperoleh dari jumlah peserta didik yang menggunakan produk dibagi jumlah peserta didik yang menjadi sampel dikali 100

Kegiatan yang mendukung pencapaian target:

- Advokasi bahasa dan sastra melalui kegiatan Kamus Masuk Sekolah dan Bineka Keliling di lima satuan pendidikan yang terdiri atas dua SD, dua SMP, dan satu SMA. Sebanyak 230 siswa SD, SMP, dan SMA mendapat pemahaman tentang pemanfaatan produk perkamusan serta memperoleh wawasan tentang keberagaman bahasa dan sastra di Indonesia.
- Telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Produk Pengembangan di 11 lokasi, yaitu DKI, Banten, Bengkulu, Jambi, Jateng, Jatim, Kalsel, Maluku, Sultra, Bali, dan Gorontalo

Kendala/Permasalahan

Terdapat data capaian yang anomali pada provinsi yang tidak mendapatkan intervensi berupa kegiatan fasilitasi. Hal itu diduga akibat dari ketiadaan pendampingan dalam pengisian survei.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memperluas kegiatan fasilitasi hingga di semua provinsi atau di setiap UPT.
2. Memperluas media diseminasi
3. Berkolaborasi dengan UPT di daerah

[SK 2] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

[IKK 2.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi

Progress/Kegiatan

Definisi:

Produk pengembangan bahasa dan sastra disebut tervalidasi jika dalam proses penyusunannya sudah melalui tahapan pembakuan dan kodifikasi. Pembakuan adalah proses, cara, dan perbuatan menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. Sementara itu, kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

pembentukan istilah, dan kamus. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia.

Metode Penghitungan:

Penghitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra pada satu tahun dengan produk pengembangan yang sudah ada, kemudian dikali seratus persen

Kegiatan yang mendukung pencapaian target:

Telah selesai dilakukan penyusunan 9 produk kodifikasi dengan rincian

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring
- Senarai Istilah Sidang Komisi Istilah
- Kamus Bidang Ilmu Pertahanan Subbidang Strategi Perang Semesta
- Kamus Bidang Ilmu Geologi
- Kamus Etimologi Inggris
- Kamus Etimologi Belanda
- Kamus Penunjang Pendidikan: Kamus Idiom
- Kamus Penunjang Pendidikan: Kamus Peribahasa
- Korpus

Kendala/Permasalahan

Proses validasi sedikit terhambat karena ada permintaan agar validasi dilakukan oleh Mendikdasmen. Sementara dalam Permendikbudristek yang dijadikan acuan disebutkan validasi dilakukan oleh Kepala Badan.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi: validasi tetap oleh Kepala Badan sesuai dengan Permendikbudristek no 18 tahun 2022.

[SK 3] Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
[IKK 3.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

Progress/Kegiatan

Definisi:

Penambahan entitas bahasa dalam pemetaan, meliputi bahasa, dialek, subdialek, atau beda wicara yang terverifikasi dan/atau terdokumentasi terhadap jumlah entitas bahasa, sastra dan aksara yang terpetakan

Terdapat kenaikan angka Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi, dilakukan karena Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara membutuhkan data pemetaan bahasa yang memadai agar dapat berfungsi optimal sebagai dasar perumusan kebijakan. Target 2,8% yang merupakan angka nasional, dinilai belum mencukupi untuk menghasilkan gambaran kebinekaan bahasa, sastra, dan aksara yang komprehensif dalam waktu lima tahun mendatang. Oleh karena itu, peningkatan target menjadi 6,4% diperlukan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

untuk mempercepat ketersediaan data kebahasaan yang representatif

Metode Penghitungan:

Penghitungan dilakukan dengan cara menghitung penambahan tiap-tiap entitas bahasa, sastra dan/atau aksara dibagi dengan jumlah entitas bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan dikalikan seratus.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target:

Pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra dalam bingkai Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra pada tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh seluruh UPT Balai dan Kantor di Indonesia di bawah koordinasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra telah selesai. Berdasarkan hasil verifikasi pengolahan data bahasa dan sastra terdapat penambahan bahasa di sejumlah wilayah provinsi serta penambahan sastra lisan dan cetak. Selain penambahan bahasa, sejumlah provinsi lain melaporkan adanya penambahan entitas berupa variasi bahasa yang lain, yakni dialek, subdialek, dan wicara.

Kendala/Permasalahan

Sejumlah UPT Balai/Kantor kesulitan menghitung persentase penambahan capaian penambahan bahasa dan sastra.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan rapat koordinasi secara daring dan pendampingan secara intensif terhadap UPT yang mengalami kendala.

[SK 4] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra [IKK 4.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Progress/Kegiatan

Definisi

Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2025 sudah dapat dilihat melalui aplikasi <https://money.kemenkeu.go.id/>, per tanggal 14 Januari 2026 nilai Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2025 adalah 95,98 dengan predikat Sangat Baik, sesuai dengan target yang ditetapkan, dan dengan rincian nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100, dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 91,95.

Upaya yang sudah dilakukan di triwulan IV adalah

- Melakukan revisi halaman III DIPA untuk triwulan IV
- Menginput capaian output bulan Oktober–Desember dengan tepat waktu
- Melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Semester II
- Mengundang narasumber terkait penilaian NKA untuk membantu menyusun strategi penilaian NKA
- Mempercepat proses administrasi kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Kendala/Permasalahan

- Masih terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaan kegiatan dari yang sudah direncanakan
- laporan kegiatan yang tidak tepat waktu dibuat sehingga menghambat proses administrasi

Strategi/Tindak Lanjut

- memantau dan mengingatkan secara berkala setiap triwulan terkait pelaksanaan kegiatan
- mengingatkan berkala dan melibatkan penanggungjawab kegiatan dari tim kerja pada kegiatan penyusunan laporan keuangan semester II untuk menyelesaikan dan melengkapi laporan kegiatan yang masih belum selesai

[SK 4] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
[IKK 4.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A

Progress/Kegiatan**Definisi**

Telah terlaksana penilaian SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2025 melalui surat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Inspektur III pada 14 Desember 2025, nilai SAKIP yang diraih oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra yaitu 89,25 dengan predikat A

upaya yang telah dilakukan di triwulan IV adalah

- melengkapi dan memperbaiki data dukung yang masih dirasa kurang lengkap atau kurang jelas oleh penilai SAKIP
- melakukan sanggah nilai SAKIP ke inspektorat jenderal

Kendala/Permasalahan

Masih sedikit pegawai yang sudah mengikuti diklat SAKIP, dan semuanya adalah bagian administrasi, belum ada yang dari tim kerja

Strategi/Tindak Lanjut

Mengajukan diklat SAKIP ke Sekretariat Badan Bahasa

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7569.QMA.001] Alih Wahana Karya Sastra	dokumen	34	34	Rp1.100.000.000	Rp1.055.320.140	95.94

**Catatan :**

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
2	[DL.7569.QMA.002] Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	dokumen	9	9	Rp12.832.615.000	Rp12.512.573.301	97.51
3	[DU.7566.PEG.001] Perhelatan Karya Kreatif Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Kegiatan	1	1	Rp3.298.808.000	Rp3.287.375.971	99.65
4	[DU.7566.QMA.002] Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	dokumen	3	3	Rp3.918.515.000	Rp3.793.685.842	96.81
5	[WA.7613.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	Rp10.000.000	Rp4.764.000	47.64
6	[WA.7613.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	1	1	Rp185.256.000	Rp176.688.996	95.38
7	[WA.7613.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	2	2	Rp739.699.000	Rp710.040.664	95.99
8	[WA.7613.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	Rp10.098.763.000	Rp9.875.476.263	97.79
9	[WA.7613.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	Rp191.064.000	Rp167.355.070	87.59
10	[WA.7613.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	17	17	Rp331.595.000	Rp308.093.035	92.91
11	[WA.7613.EBD.974] Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1	1	Rp114.164.000	Rp109.023.929	95.50
Total Anggaran					Rp32.820.479.000	Rp32.000.397.211	97.5

D. Rekomendasi Pimpinan

[IKK 1.1] Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

- Kegiatan fasilitasi pemanfaatan produk pengembangan perlu terus dilaksanakan pada tahun 2026 untuk memastikan target IKK tercapai.
- Jangkauan fasilitasi perlu diperluas di seluruh Balai/Kantor Bahasa.
- Pemanfaatan berbagai media sosial untuk sosialisasi produk yang telah dihasilkan oleh Pusbanglin perlu ditingkatkan.

[IKK 2.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- Validasi produk Pusbanglin dilakukan sesuai dengan Permendikbudristek No. 18 Tahun 2021.

[IKK 3.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan

- Penghitungan IKK di setiap Balai/Kantor Bahasa perlu dilakukan dengan pendampingan Tim Kerja Molinbastra Pusat.
- Tim Balai/Kantor Bahasa perlu memastikan isian IKK sesuai dengan definisi operasional.
- Koordinasi intensif perlu dilakukan dengan Balai/Kantor Bahasa.

[IKK 4.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

- Pemantauan berkala untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan perlu dilakukan dan memastikan laporan kegiatan selesai tepat waktu.
- Pelibatan penanggung jawab kegiatan perlu dilakukan untuk memastikan keterserapan anggaran.

[IKK 4.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A

- Koordinasi dan kerja sama perlu ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan.
- Peningkatan kompetensi terkait dengan SAKIP perlu diberikan kepada semua pegawai.

Bogor, 19 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Pusat Pengembangan dan
 Pelindungan Bahasa dan Sastra
 Dora Amalia



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA**

Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC)
Jalan Anyar km.4, Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman spiritpusbanglin.kemendikdasmen.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR, DAN MENENGAH
Nomor: 1915/I2/PR.04.00/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang : a. Bahwa Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagai salah satu Satuan kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki salah satu fungsi untuk mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Bahwa untuk meningkatkan dan mengedalikan capaian kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra perlu adanya Tim Penyusun Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029.

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHAS DAN SASTRA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini.
- KEDUA : Tim Penyusun bertugas menyusun Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2025 dan menyampaikannya kepada Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra , Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 14 Juli 2025
KEPALA,



Dora Amalia
DORA AMALIA
NIP. 197107292002122001

- 3 -

Lampiran 1

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Nomor : 1915/J2/PR.04.00/2025

Tanggal : 14 Juli 2025

TIM LAPORAN KINERJA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA 2025

No	Nama	Jabatan	Struktur dalam Tim	Keterkaitan
1.	Dr. Dora Amalia NIP 197107292002122001	Kepala Pusat	Penanggung Jawab	Pimpinan
2.	Sri Haryanti, S.E. NIP 197308102005012001	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua	Tata Usaha
3.	Dr. Adi Budiwiyanto, M.Hum. NIP 197810152003121003	Kepala Bidang Fasilitasi dan Advokasi	Anggota	Bidang Fasilitasi dan Advokasi
4.	Dr. Dewi Puspita NIP 197605012006042001	Widyabasa Ahli Madya	Anggota	KKLP Kamus dan Istilah
5.	Dwi Agus Erinita, S.S., M.Hum. NIP 197208201999032002	Widyabasa Ahli Madya	Anggota	KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra
6.	Yan Ferianto, S.T. NIP 198306212009121006	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	Tata Usaha: Perencanaan
7.	Siti Sulastri, S.Kom. NIP 197902122003122004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota	Tata Usaha: Keuangan
8.	Anton Andriana, S.E. NIP 198308172003121006	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota	Tata Usaha: Kepegawaian
9.	Halipah Nasyiah Syafir, S.Kom. NIP 198305272009122006	Pranata SDM Aparatur Penyelia	Anggota	Tata Usaha: Kepegawaian
10.	Wahyu Dwi Nuryanto, A.Md. NIP 199604152022031008	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	Tata Usaha: Evaluasi

KEPALA,

DORA AMALIA
NIP 197107292002122001

SK TIM REVIU LAPORAN KINERJA



Kemendikdasmen

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Jalan Anyar Km. 4, Sukahati, Citeureup, Bogor, 16810
www.kemendikdasmen.go.id
177

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR, DAN MENENGAH
Nomor: 0126/G2/PR.06.00/2026

TENTANG
TIM REVIU LAPORAN KINERJA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang** :
- Bahwa Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagai salah satu Satuan kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki salah satu fungsi untuk mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - Bahwa untuk meningkatkan dan mengedalikan capaian kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra perlu adanya Tim Reviu Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2026;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2026.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSrE.

- 2 -

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG TIM REVIU LAPORAN KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2026.
- KESATU :** Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini.
- KEDUA :** Tim Reviu bertugas mereviu Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2026 dan menyampaikannya kepada Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Januari 2026

KEPALA,



DORA AMALIA
NIP 197107292002122001

Lampiran 1
Lampiran Surat Keputusan
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra
Nomor : 0126/G2/PR.06.00/2026
Tanggal : 28 Januari 2026

**TIM REVIU LAPORAN KINERJA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA 2026**

No	Nama	Jabatan	Struktur dalam Tim	Keterkaitan
1.	Eri Setyowati NIP 198102192006042001	Widyabasa Ahli Madya	Ketua	Tim Kerja Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra
2.	Lisa Misliani NIP 198007312003122002	Widyabasa Ahli Madya	Anggota	Tim Kerja Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra
3.	Azhari Dasman Darnis NIP 197305142001121005	Widyabasa Ahli Madya	Anggota	Tim Kerja Kamus dan Istilah
4.	Amat Triatna NIP 198212102014041001	Widyabasa Ahli Muda	Anggota	Tim Kerja Kamus dan Istilah
5.	Dzien Nuen Almisri NIP 198707312014041001	Widyabasa Ahli Muda	Anggota	Tim Kerja Kamus dan Istilah
6.	Retno Handayani NIP 198605252009122004	Widyabasa Ahli Muda	Anggota	Bidang Fasilitasi dan Advokasi

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Januari 2026

KEPALA,



DORA AMALIA
NIP 197107292002122001

KERTAS KERJA REVIU LAKIN

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒

Pernyataan		Check List
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana strategis	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒

SURAT PERNYATAAN REVIU LAKIN

**Pernyataan Telah Direviu
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Tahun Anggaran 2025**

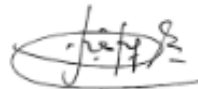
Kami telah mereviu laporan kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 29 Januari 2026

Ketua Tim Reviu,



Eri Setyowati